

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SIKKA 2021

<https://sikkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIKKA**



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SIKKA 2021

<https://sikkakab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIKKA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SIKKA 2021

ISSN	:	
Nomor Publikasi	:	53100.2231
Katalog BPS	:	4102004.5310
Ukuran Buku	:	28 X 21,5 CM
Jumlah Halaman	:	viii + 79 halaman
Naskah	:	Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Penyunting	:	
Gambar Kulit	:	Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka
Diterbitkan Oleh	:	Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka

BOLEH DIKUTIP DENGAN MENYEBUTKAN SUMBERNYA/
May be cited with reference to be source

KATA PENGANTAR

Untuk memenuhi kebutuhan konsumen data statistik, khususnya data publikasi sosial, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka kembali menerbitkan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sikka 2021 yang merupakan kelanjutan publikasi edisi sebelumnya.

Publikasi ini menyajikan berbagai data dasar yang mencakup enam bidang yakni Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf Pola Konsumsi serta Perumahan dan Lingkungan. Data yang dimuat dalam publikasi bersumber dari Sensus dan Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (seperti data Susenas, Sakernas dan Sensus Penduduk) serta data dari instansi lain.

Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka secara umum berdasarkan penilaian atas enam bidang tersebut.

Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya sempurna, maka segala kritik dan saran dari berbagai pihak kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu sampai terbitnya publikasi ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan dengan harapan semoga kerja sama yang serupa dapat ditingkatkan terus pada masa yang akan datang.

Sikka, 28 Desember 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sikka,



Kristanto Setyo Utomo SST, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v - vi
DAFTAR GAMBAR	vii
SINGKATAN DAN AKRONIM.....	viii
PENDAHULUAN	3 – 8
I. KEPENDUDUKAN	11 – 24
II. KESEHATAN DAN GIZI	27 – 31
III PENDIDIKAN	34 – 41
IV. KETENAGAKERJAAN	44 – 51
V. KEMISKINAN DAN POLA PENGELUARAN	54 – 63
VI. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	66 – 73
DAFTAR PUSTAKA	76 – 79

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Komponen dan Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	8
Tabel 1.1	Struktur Umur dan Umur Median Penduduk di Kabupaten Sikka, Tahun 2017-2021	16
Tabel 1.2	Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka, Tahun 2017-2021	18
Tabel 1.3	Rasio Beban Ketergantungan Di Kabupaten Sikka, Tahun 2017-2021	19
Tabel 1.4	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sikka, Tahun 2011–2021	20
Tabel 1.5	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka, Tahun 2017-2021	23
Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka, Tahun 2021	28
Tabel 2.2	Persentase Anak Usia 0-23 Bulan Menurut Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) di Kabupaten Sikka, Tahun 2021	29
Tabel 2.3	Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) Yang Pernah Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka, Tahun 2021	30
Tabel 2.4	Persentase) Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Cakupan Imunisasi di Kabupaten Sikka, Tahun 2021	30
Tabel 2.5	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan menurut Penolong Persalinan di Kabupaten Sikka, Tahun 2021	31
Tabel 3.1	Angka Melek Huruf Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka, Tahun 2021	36
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Sikka Menurut Kelompok Umur, Tahun 2021	37
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sikka, Tahun 2017–2021	38
Tabel 3.4	Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Sikka, Tahun 2019-2021	39

Tabel 3.5	Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Sikka, Tahun 2017– 2021	40
Tabel 3.6	Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid – Sekolah di Kabupaten Sikka Tahun Ajaran 2019/2020	41
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka, Tahun 2019 – 2021	46
Tabel 4.2	Komposisi Penduduk Kabupaten Sikka Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2021	47
Tabel 4.3	Komposisi Penduduk Kabupaten Sikka Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2017-2021	50
Tabel 5.1	Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Sikka, Tahun 2017-2021	58
Tabel 5.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perlindungan Sosial Yang Diterima Selama Tahun 2021, di Kabupaten Sikka	60
Tabel 5.3	Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Distribusi Pengeluaran Per Kapita Sebulan dan Jenis Pengeluaran di Kabupaten Sikka, Tahun 2021	61
Tabel 5.4	Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Sikka, Tahun 2021	62
Tabel 6.1	Indikator Kondisi Rumah di Kabupaten Sikka, Tahun 2018-2021	67
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Sikka, Tahun 2021	71
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Sikka menurut Kepemilikan Telepon Seluler/Komputer, Tahun 2021	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Perkembangan IPM Kabupaten Sikka, Ende, dan Flores Timur, Tahun 2017-2021	8
Gambar 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sikka, Tahun 2017-2021	13
Gambar 1.2 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Sikka, 2017 - 2021	19
Gambar 1.3 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sikka, 2011–2021	21
Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Sikka, Tahun 2021	68
Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Energi Yang Digunakan Untuk Memasak di Kabupaten Sikka, Tahun 2021	69
Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Sikka, 2021	70
Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Menurut Jenis Kloset di Kabupaten Sikka, Tahun 2021	72

SINGKATAN DAN AKRONIM

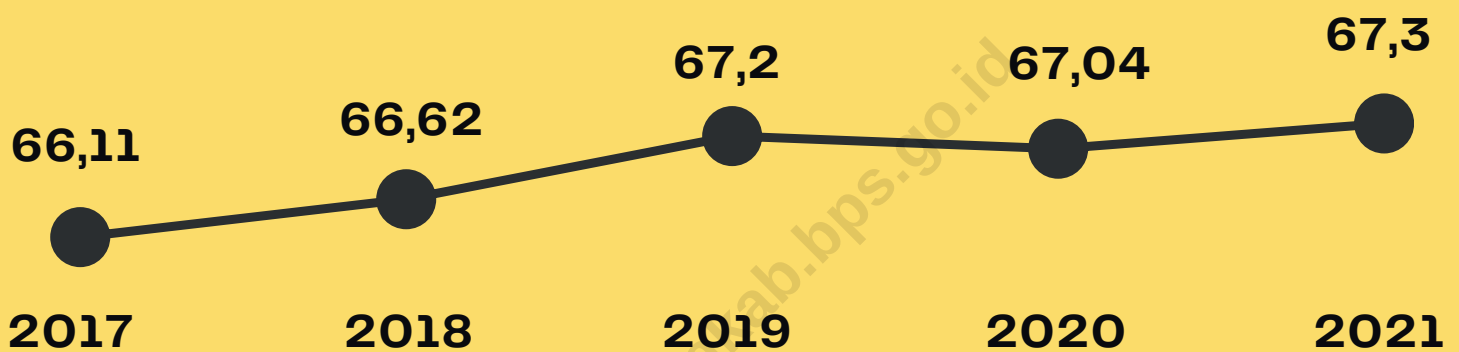
- 1) AKB : Angka Kematian Bayi
- 2) AKDR : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
- 3) KB : Keluarga Berencana
- 4) SP : Sensus Penduduk
- 5) SUPAS : Survei Penduduk Antar Sensus
- 6) SUSENAS : Survei Sosial Ekonomi Nasional
- 7) Sakernas : Survei Angkatan Kerja Nasional
- 8) TFR : Total Fertility Rate
- 9) TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- 10) Podes : Potensi Desa
- 11) SD : Sekolah Dasar
- 12) SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
- 13) SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
- 14) SM : Sekolah Menengah
- 15) SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
- 16) PPLS : Pendataan Program Perlindungan Sosial

KETERANGAN NOTASI

- Menunjukkan nol atau dapat diabaikan
- , Diantara dua angka dalam tabel menunjukkan desimal
- ... Data tidak tersedia
- x Angka sementara
- xx Angka sangat sementara
- r Angka diperbaiki
- e Angka perkiraan

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sikka Tahun 2017 - 2021



Komponen Pembentuk IPM

AHH



67,45
(Tahun)

HLS & RLS



13,43 & 6,95
(Tahun)

Pengeluaran
Perkapita



8.021
(Rp)



PENDAHULUAN

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kabupaten Sikka ini merupakan terbitan tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka yang menyajikan berbagai macam data statistik sosial yang sudah diolah ulang menjadi suatu kumpulan indikator. Data statistik yang disajikan dipilih sedemikian rupa sehingga secara langsung memberikan gambaran mengenai taraf, pemerataan serta perkembangan kesejahteraan rakyat Kabupaten Sikka. Pada bagian ini disajikan secara singkat latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika isi terbitan ini

Latar Belakang

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah dapat tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tingkat atau standar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui peningkatan pelayanan masyarakat yang mampu menyentuh semua lapisan sosial ekonomi masyarakat, dan mencakup pula penyediaan pangan yang baik, sandang dan papan atau perumahan bagi seluruh rakyat. Sementara itu, dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Artinya, pembangunan ekonomi dapat dianggap berhasil jika tingkat kesejahteraan rakyat juga semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan manajemen wilayah. Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang memungkinkan suatu daerah memiliki kemampuan ekonomi untuk mendukung kegiatan lainnya, sedangkan sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan bagaimana kesejahteraan tersebut ditingkatkan. Sementara itu, manajemen wilayah lebih mengacu pada sistem pengaturan dan peraturan yang dikembangkan dalam wilayah tersebut. Hal ini bukan hanya yang dikembangkan oleh birokrasi pemerintahan, tetapi juga yang dikembangkan oleh pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri. Faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah faktor budaya. Keanekaragaman budaya bukan hanya sebagai kekayaan wilayah yang berpotensi di sektor pariwisata, tetapi tidak jarang juga menjadi faktor penghambat maupun pendorong dalam proses pembangunan. Dampak kebiasaan masyarakat dapat bernilai positif bagi peningkatan kesejahteraan, tetapi juga dapat bernilai negatif dalam upaya peningkatan kesejahteraan (Ulah Tri Wibowo dan Tukiran 2003).

Kesejahteraan pada dasarnya tidak hanya terdiri dari satu dimensi atau berdimensi tunggal, melainkan multidimensi. Atau dengan kata lain, kesejahteraan terdiri dari beberapa komponen atau indikator yang menyusunnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan, antara lain, adalah kesehatan, pendidikan, dan kualitas tempat tinggal. Indikator kesehatan diukur dengan, antara lain menggunakan variabel keluhan kesehatan dan lama sakit. Keluhan kesehatan sebagai indikasi adanya tingkat kesakitan/morbiditas, sedangkan lama sakit sebagai faktor lama gangguan yang dapat berpengaruh pada produktivitasnya. Kemudian, indikator pendidikan diukur dengan variabel melek huruf dan pendidikan yang ditamatkan diasumsikan dapat menggambarkan kemampuan sumber daya manusia dalam menemukan dan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Indikator ekonomi didekati dengan variabel pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, sedangkan kualitas tempat tinggal dapat menggambarkan tingkat hunian dan kesejahteraan masyarakat (Ulah Tri Wibowo dan Tukiran 2003).

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah maupun nasional, memerlukan data atau informasi statistik. Data statistik merupakan input yang sangat penting bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap program dan kebijakan pembangunan karena data statistik memberikan fakta yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperbaiki. Dengan data statistik yang dapat dipercaya, penentu kebijakan dan pembuat keputusan dapat menggunakan ukuran yang obyektif dan bukan berdasarkan pada persepsi individu di dalam membuat suatu keputusan. Program-program yang dihasilkan dari proses pembuatan keputusan yang benar cenderung akan lebih berhasil dengan baik dalam pencapaian sasaran pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Indikator kesejahteraan rakyat (Inkesra) merupakan salah satu informasi statistik yang menggambarkan keadaan sosial ekonomi suatu wilayah/regional. Dengan Inkesra yang disusun secara berkala, rencana pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah akan dapat memantau dan menilai hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Publikasi ini menyajikan gambaran mengenai taraf kesejahteraan rakyat dan perkembangannya antar waktu. Untuk mengukur taraf kesejahteraan rakyat digunakan indikator dampak. Publikasi ini juga menyajikan indikator-indikator input, proses, dan output untuk memberikan gambaran tentang investasi dari berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat serta proses dan manfaat dari program tersebut pada tingkat individu, keluarga, dan penduduk. Antara indikator input dan indikator dampak tidak selalu sejalan. Penjelasannya sederhana: input

atau investasi dalam suatu program hanya akan memberikan dampak yang diharapkan jika implementasi program berjalan secara benar. Oleh karena itu kesenjangan antara input dan dampak suatu program kesejahteraan rakyat sebaiknya dilihat sebagai pertanda adanya kekeliruan dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat.

Maksud dan Tujuan

Publikasi ini disusun secara garis besarnya adalah untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sikka. Secara khusus Inkesra dapat digunakan oleh para perencana, penentu kebijakan, dan pembuat keputusan lainnya untuk : **pertama**, menilai hasil dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan rumah tangga; **kedua**, memantau dampak sosial dari kebijakan dan pengeluaran masyarakat serta untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan pengeluaran masyarakat dan individu untuk berbagai jasa pelayanan masyarakat, **ketiga**, untuk mengukur kondisi, keadaan, dan perkembangan kesejahteraan penduduk, **keempat**, untuk menarik perhatian para perencana umum, pembuat kebijakan dan membandingkan antara berbagai masalah-masalah sosial, kesenjangan sosial serta untuk memantau perkembangan sepanjang waktu, dan **kelima**, untuk memantau kondisi kelompok penduduk pada lapisan masyarakat tertentu yang mungkin masih memerlukan perhatian dan bantuan khusus.

Sistematika

Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat (*visible*) jika dilihat dari suatu aspek tertentu. Oleh karena itu dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga, dan perumahan. Setiap aspek disajikan secara terpisah dan merupakan bab tersendiri. Selain itu, tidak semua permasalahan kesejahteraan rakyat dapat diamati dan atau dapat diukur. Publikasi ini hanya menyajikan permasalahan kesejahteraan rakyat yang dapat diamati dan dapat diukur (*measurable welfare*) baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit.

Sumber data utama Inkesra 2021 adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Semua sumber data tadi bersifat primer dalam arti dikumpulkan dan diolah oleh BPS. Selain menggunakan data primer, terbitan ini juga memakai data sekunder atau data yang berasal dari luar BPS.

Upaya untuk menyediakan sumber data yang tetap bagi publikasi Inkesra telah dilakukan oleh BPS melalui perluasan cakupan pertanyaan pokok Susenas (Kor Susenas) sejak tahun 1993 agar menjadi suatu alat untuk mengkaji dan memantau pelaksanaan pembangunan di sektor sosial atau kesejahteraan rakyat. Data dan indikator sektoral bidang kesejahteraan rakyat yang dapat dihasilkan melalui Susenas dapat digunakan setiap tahun untuk melihat dampak dan hasil dari upaya pembangunan manusia bagi kesejahteraan rakyat pada tingkat kabupaten/kota. Selain itu, data Susenas dapat digunakan untuk mengkaji kaitan antar variabel sektoral – misalnya kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, pengeluaran dan konsumsi rumah tangga – untuk mengungkap perkembangan fenomena tertentu misalnya perkembangan atau peningkatan kualitas hidup yang terjadi dari tahun ke tahun di suatu kabupaten/kota, karena data kor Susenas dikumpulkan setiap tahun. Dengan demikian publikasi Inkesra akan mempunyai sumber data yang pasti dan berkesinambungan sehingga selalu dapat menyajikan data yang relatif *up-to date*. Sedangkan data Sakernas dikumpulkan setiap tahun dapat digunakan untuk mengkaji variabel ketenagakerjaan – misalnya partisipasi angkatan kerja, pengangguran, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan.

Indeks Pembangunan Manusia

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme-UNDP*). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: 1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); 2) Pengetahuan (*knowledge*); 3) Standar hidup layak (*decent standar of living*).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data

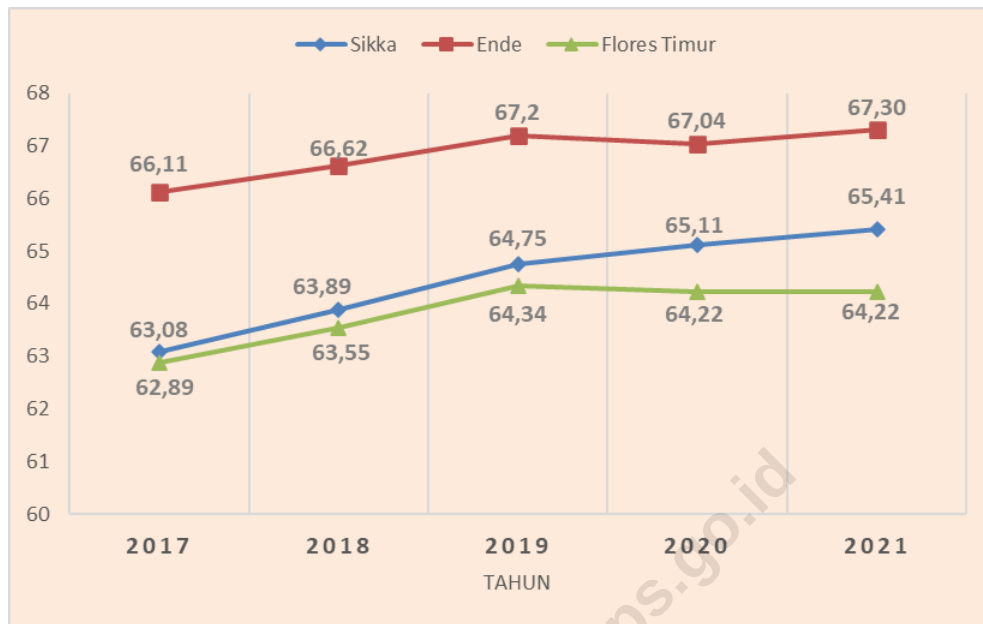
strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Sejak *launching* IPM pada tahun 1990, metodologi IPM telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada tahun 2010 UNDP merubah komponen IPM dan metode agregasi yang digunakan. Awalnya pada tahun 1990, komponen IPM yang digunakan Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH) dan Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita serta metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata aritmatik. Lalu pada tahun 2010, komponen IPM yang digunakan berubah menjadi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Produk Nasional Bruto (PNB) per Kapita. Metode agregasi yang digunakan juga berubah menjadi rata-rata geometrik. Kemudian pada tahun 2014 UNDP melakukan beberapa penyempurnaan antara lain mengganti tahun dasar PNB per Kapita dari 2005 menjadi 2011 dan merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.

Ada beberapa alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM, antara lain:

- Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
- PDB per Kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

IPM Kabupaten Sikka terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2021. Dimana pada tahun 2017 skor IPM Kabupaten Sikka adalah sebesar 63,08. Lalu terus mengalami peningkatan hingga mencapai skor IPM sebesar 65,41 pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka masih memiliki IPM yang jauh lebih rendah. Kita berharap daerah ini dapat mengejar kemajuan pembangunan manusia dibandingkan daerah lain yang telah mengalami kemajuan. Untuk itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari kita semua, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam melakukan pemerataan pembangunan dalam segala bidang.

Gambar 1. Perkembangan IPM Kabupaten Sikka, Ende dan Flores Timur Tahun 2017-2021



Pada tahun 2021, Kabupaten Sikka masih menduduki peringkat IPM keenam di Provinsi NTT. Lebih rendah daripada Kabupaten Ende yang menduduki peringkat ketiga. Terdapat ketimpangan yang cukup mencolok antara Kota Kupang dengan kabupaten lain di Provinsi NTT (Tabel 1). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi fokus perhatian Pembangunan Manusia di daerah ini, seyogyanya diarahkan pada upaya membangun berbagai aspek yang akan bekerja dalam proses peningkatan kualitas manusia. Tugas para analis, pemerhati, perencana dan pengambil keputusan di daerah ini adalah mengidentifikasi dengan lebih cermat setiap determinan dari komponen IPM dengan menggunakan data yang berkualitas.

Tabel 1. Komponen dan Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

Kabupaten	Komponen				Peringkat
	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Rill per Kapita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Kupang	69,73	16,41	11,60	13.218	1
Sikka	67,45	13,43	6,95	8.021	6
Ende	65,43	13,79	8,03	9.027	3
Flores Timur	65,31	12,92	7,72	7.578	10
NTT	67,15	13,20	7,69	7.554	32

Halaman Kosong

1

KEPENDUDUKAN

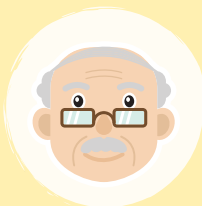
Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2021

324.252

Persentase Penduduk Lanjut Usia
(Lansia) di Kabupaten Sikka,
2021



12,45%



10,44%

Rasio Jenis
Kelamin
Penduduk
Kabupaten Sikka,
2021

93,87

Rasio jenis kelamin sebesar 93,87 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki di Kabupaten Sikka.

BAB I

KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah pusat pembangunan karena pada dasarnya penduduk merupakan subyek dan obyek pembangunan. Dengan demikian, perubahan kondisi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduk akan berdampak pada situasi pembangunan nasional dan daerah. Selanjutnya, penanganan berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi di suatu daerah seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, kemiskinan, dan pengangguran seharusnya didasarkan pada situasi kuantitas dan kualitas SDM penduduk. Itulah sebabnya, pembangunan tidak dapat mengabaikan aspek-aspek kependudukan. Dengan perkataan lain, perencanaan pembangunan seharusnya berwawasan kependudukan, sehingga pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan: peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebab, esensi dari pembangunan adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang situasi kuantitas dan kualitas SDM penduduk serta keterkaitannya dengan pembangunan adalah penting.

Pembangunan ekonomi tanpa didukung kualitas penduduk yang memadai tidak akan berkelanjutan. Sebaliknya, peningkatan kualitas penduduk tidak akan terjadi jika tidak ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas penduduk akan sulit dilaksanakan jika jumlah penduduk semakin besar dan sudah terlanjur rendah kualitasnya. Membiarkan pertumbuhan penduduk dengan kualitas rendah menjadi tidak terkendali akan mempersulit persoalan pembangunan nasional dan di daerah.

Hubungan antara penduduk dan pembangunan dapat dijelaskan melalui suatu proses yang menggambarkan integrasi variabel demografi dan pembangunan, yang disebut siklus analisis demografi. Perubahan dalam tiga elemen pokok dinamika kependudukan yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi) dapat mempengaruhi jumlah, komposisi (struktur), dan persebaran (distribusi) penduduk. Sedangkan perubahan dalam jumlah, struktur, dan distribusi penduduk dapat berpengaruh ke berbagai aspek pembangunan. Selanjutnya perubahan pada berbagai aspek pembangunan akan mempengaruhi kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi), demikian seterusnya.

Jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk merupakan keseimbangan dinamis karena sifatnya yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan amat cepat yang terjadi perlu

dicermati dan membutuhkan perhitungan terus-menerus agar hasilnya bermanfaat dalam membuat perencanaan yang sedapat mungkin relevan dengan kondisi kini maupun di masa depan, yang dapat diperkirakan berdasarkan data kependudukan masa kini maupun pada waktu lampau.

Oleh sebab itu, untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan berwawasan kependudukan, dibutuhkan data dan informasi yang baik mengenai berbagai aspek kependudukan, baik keadaan pada masa lalu, kini maupun perkiraan keadaan di masa yang akan datang. Namun demikian, belum baiknya sistem pencatatan registrasi penduduk di Indonesia mengakibatkan sebagian data atau bahkan keseluruhan data kependudukan yang tersedia selama ini masih diperoleh dari hasil Sensus Penduduk dan survei-survei kependudukan lainnya, seperti Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Khusus Susenas, instrument pengumpulan data terdiri dari dua set kuesioner yang berbeda, yaitu kuesioner Susenas Kor dan kuesioner Susenas Modul. Kuesioner Kor merupakan kuesioner induk yang menanyakan data dasar dan selalu digunakan dalam setiap tahun pencacahan data Susenas. Sedangkan kuesioner modul berbeda setiap tiga tahun seperti modul konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, modul tentang pendidikan dan sosial budaya, serta modul perumahan dan kesehatan. Data-data tersebut sangat berguna bagi Pemerintah dalam merencanakan pembangunan sektoral maupun lintas sektoral.

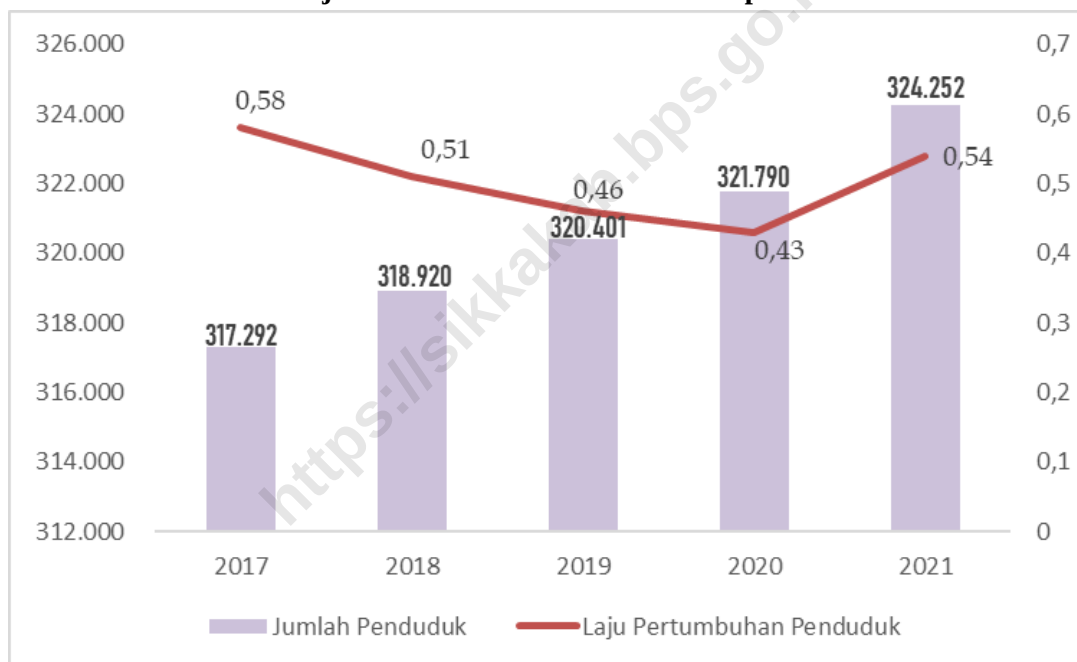
Dalam bab ini akan diulas secara singkat mengenai kependudukan yang mencakup jumlah dan pertumbuhan, kepadatan, dan struktur/komposisi penduduk menurut beberapa karakteristik demografi seperti umur dan jenis kelamin, status perkawinan, rumah tangga, fertilitas dan keluarga berencana.

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pengertian pertumbuhan dengan perkembangan penduduk berbeda. Perkembangan penduduk merupakan besarnya perubahan jumlah penduduk dari satu tahun ke tahun berikutnya. Ukuran tentang jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan suatu wilayah pada tahun tertentu. Jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu dipengaruhi oleh banyaknya kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk (*migration*) yang masuk atau keluar dari wilayah tersebut. Kelahiran yang terjadi akan bersifat penambah sedang kematian akan bersifat pengurang terhadap jumlah penduduk. Begitu pula halnya dengan migrasi, jumlah penduduk yang masuk bersifat penambah dan penduduk yang keluar bersifat pengurang.

Sedangkan pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara di masa yang akan datang yang selanjutnya akan melahirkan konsep proyeksi penduduk. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di bidang politik misalnya mengenai jumlah pemilih untuk pemilu yang akan datang. Tetapi prediksi jumlah penduduk dengan cara seperti ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan proyeksi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang membutuhkan data yang lebih rinci yakni mengenai tren fertilitas, mortalitas dan migrasi.

Gambar 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021



Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi NTT

Gambar 2 memperlihatkan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sikka selama kurun waktu 2017-2021. Informasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah absolut penduduk Kabupaten Sikka dari waktu ke waktu. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Sikka sebesar 317,3 ribu jiwa, kemudian meningkat menjadi 324,3 ribu jiwa pada tahun 2021. Selama periode 1980-1990 penduduk Kabupaten Sikka bertambah sebanyak 27,2 ribu orang, periode 1990-2000 bertambah 17,7 ribu orang, periode 2000-2010 bertambah sebanyak 35,6 ribu orang, dan selama periode 2010-2021 bertambah sebanyak 24,1 ribu orang. Hal ini menunjukkan

bahwa pertambahan penduduk Kabupaten Sikka selama antar periode tersebut terus meningkat jumlahnya.

Laju pertambahan penduduk tersebut, pada akhirnya juga berkorelasi dengan persoalan penyediaan pangan, energi, fasilitas permukiman yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, fasilitas pendidikan yang berkualitas, dan bahkan subsidi BBM. Selain itu, kemampuan bumi yang terbatas juga tidak mampu secara cepat menyuplai kebutuhan manusia yang bertambah dengan cepat. Faktor alam yang menjadi bahan pertimbangan utama adalah tanah, air, dan ruang. Akibatnya, selain terjadi penurunan daya dukung lingkungan, kesejahteraan penduduk pun mengalami penurunan. Ketidakmampuan menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup berdampak pada naiknya angka pengangguran dan kemiskinan.

Meskipun dari segi jumlah penduduk Kabupaten Sikka secara absolut mengalami kenaikan, dilihat dari angka laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami penurunan, hanya di tahun 2021 yang mengalami kenaikan sebesar 0,54 persen. Sejak dicanangkan program KB nasional, maka laju pertumbuhan penduduk secara perlahan tapi pasti dapat ditekan secara bertahap, dan angkanya di bawah satu persen selama kurun waktu 1980–2021. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sikka dari periode 2020 ke 2021 mengalami peningkatan mungkin disebabkan karena teknologi dibidang kesehatan semakin berkembang dan pemahaman masyarakat akan kesehatan semakin baik, sehingga dapat menekan angka kematian bayi.

Karakteristik Penduduk

Dalam pengetahuan tentang kependudukan dikenal istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin, atau yang sering juga disebut struktur umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk dapat dilihat dalam umur satu tahunan atau yang disebut juga umur tunggal (*single age*), dan yang dikelompokkan dalam lima tahunan. Dalam pembahasan demografi pengertian umur adalah umur pada saat ulang tahun terakhir. Misalnya Seseorang lahir pada bulan April tahun 1997 dan Sensus Penduduk 2010 dilaksanakan pada bulan Mei. Jadi pada saat Sensus Penduduk 2010 dilaksanakan maka orang tersebut berusia 13 tahun 1 bulan, tetapi dalam perhitungan demografi dicatat berumur 13 tahun saja.

Informasi tentang jumlah penduduk untuk kelompok usia tertentu penting diketahui agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk sebagai pelaku pembangunan.

Keterangan atau informasi tentang penduduk menurut umur yang terbagi dalam kelompok umur lima tahunan, sangat penting dan dibutuhkan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai beban sekaligus juga modal dalam pembangunan.

Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) termasuk bayi dan anak (usia 0-4 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas). Juga dapat dilihat berapa besar persentase penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun. Selain itu, dalam pembangunan berwawasan gender, penting juga mengetahui informasi tentang jumlah penduduk perempuan terutama yang termasuk dalam kelompok usia reproduksi (usia 15-49 tahun), partisipasi penduduk perempuan menurut umur dalam pendidikan, dalam pekerjaan dan lain-lain.

Pengelompokkan penduduk menurut umur juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah termasuk berstruktur umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk muda apabila penduduk usia di bawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih dari jumlah seluruh penduduk. Sebaliknya, penduduk disebut penduduk tua apabila jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas di atas 10 persen dari total penduduk.

Suatu wilayah yang mempunyai karakteristik penduduk muda akan mempunyai beban besar dalam investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak-anak di bawah 15 tahun ini. Dalam hal ini pemerintah harus membangun sarana dan prasarana pelayanan dasar mulai dari perawatan ibu hamil dan kelahiran bayi, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, sarana tumbuh kembang anak termasuk penyediaan imunisasi, penyediaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar termasuk guru-guru dan sarana sekolah yang lain.

Sebaliknya, suatu wilayah dengan ciri penduduk tua akan mengalami beban yang cukup besar dalam pembayaran pensiun, perawatan kesehatan fisik dan kejiwaan lanjut usia (lansia), pengaturan tempat tinggal dan lain-lain. Penduduk Indonesia termasuk Kabupaten Sikka belum dianggap penduduk tua karena persentase penduduk usia di atas 65 tahun masih kecil, namun karena jumlah penduduk yang besar, maka jumlah orang tua juga cukup besar untuk memperoleh perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah.

Seiring dengan terjadinya penurunan dalam tingkat kelahiran dan kematian, kondisi demografis penduduk Kabupaten Sikka juga mengalami perubahan. Dilihat dari komposisi umur,

persentase penduduk berumur kurang dari 15 tahun (0-14 tahun) Kabupaten Sikka cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir sebelum tahun 2021 dari 31,02 persen pada tahun 2017 menjadi 30,76 persen pada tahun 2018 dan 30,49 persen pada tahun 2019, pada tahun 2020 menjadi 30,19 persen, dan pada tahun 2021 menjadi 30,00 persen. Sementara itu, penduduk usia 65 tahun ke atas cenderung meningkat dari 6,36 persen di tahun 2017 menjadi 6,41 persen pada tahun 2018, naik menjadi 6,48 di tahun 2019 dan meningkat lagi menjadi 6,57 persen pada tahun 2020, lalu meningkat hingga 7,37 persen di tahun 2021. Dilihat dari komposisi penduduk menurut umur di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sikka dapat dikategorikan mengarah pada penduduk muda.

Penduduk yang tergolong usia produktif (15-64 tahun) mengalami peningkatan dari 62,62 persen pada tahun 2017 menjadi 62,83 persen tahun 2018, dan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 meningkat dari 63,03 persen menjadi 63,23 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 62,63 persen. Jumlah proporsi penduduk usia produktif tersebut akan berdampak pada kesempatan kerja. Tantangan yang dihadapi di era globalisasi sekarang ini adalah telah terjadi pergeseran permintaan tenaga kerja dengan penguasaan teknologi dan matematika, yang mampu berkomunikasi, serta mempunyai daya saing tinggi. Tentu kesemuanya ini berkaitan dengan program bagaimana menyiapkan calon pekerja agar mempunyai kualitas tinggi, dengan keterampilan yang memadai.

Tabel 1.1. Struktur Umur dan Umur Median Penduduk di Kabupaten Sikka, 2017-2021

Tahun	Struktur Umur (%)		
	0-14	15-64	65+
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	31,02	62,62	6,36
2018	30,76	62,83	6,41
2019	30,49	63,03	6,48
2020	30,19	63,23	6,57
2021	30,00	62,63	7,37

Sumber : BPS NTT 2017-2021

Struktur Penduduk Tua

Isu mengenai *population ageing* (penuaan penduduk) telah menjadi suatu isu global. Proses terjadinya “penduduk tua” pada dasarnya karena adanya pergeseran komposisi umur penduduk. Penurunan fertilitas dan mortalitas di satu sisi dan meningkatnya angka harapan hidup (*life expectancy*) di sisi lain menyebabkan terjadinya proses penuaan penduduk, yang ditandai dengan penurunan jumlah penduduk muda dan balita, dan terjadinya peningkatan jumlah penduduk tua (lansia).

Secara biologis, penduduk tua atau lanjut usia (lansia) adalah penduduk yang telah menjalani proses penuaan, dalam arti menurunnya daya tahan fisik yang ditandai dengan semakin rentannya terhadap serangan berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya usia, terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Proses penuaan berbeda dengan “pikun” (*senila dementia*), yaitu perilaku aneh atau sifat pelupa dari seseorang di usia tua. Pikun merupakan akibat dari tidak berfungsinya beberapa organ otak, yang dikenal dengan penyakit Alzheimer (Prihastuti, 2001).

Secara demografis, pengelompokan penuaan penduduk dapat dilihat dari beberapa ukuran yaitu *dependency ratio* (angka beban tanggungan), persentase penduduk lansia, dan dari sisi umur median penduduk. Dari *dependency ratio* suatu penduduk disebut sebagai penduduk tua jika *dependency ratio* penduduk tuanya di atas 10 persen. Dari persentase penduduk lansia (usia 60 tahun ke atas), struktur penduduk disebut sebagai penduduk tua jika persentase penduduk lansianya sudah mencapai 7 persen ke atas. Sedangkan dari umur median penduduk, sebuah penduduk disebut sebagai penduduk tua jika umur mediannya 30 tahun ke atas.

Jika dilihat dari penduduk lansia (usia 60 tahun ke atas), seperti tersaji pada Tabel 1.2, tampak bahwa penduduk lansia di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan dari 9,76 persen tahun 2017 menjadi 9,79 persen tahun 2018 lalu meningkat menjadi 10,01 persen tahun 2019 dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 10,31 persen dan menjadi 11,50 persen di tahun 2021. Dari proporsinya tampak bahwa Kabupaten Sikka sudah mengarah pada era “penduduk berstruktur tua” (*ageing population*), yaitu suatu wilayah dengan proporsi penduduk lansianya telah berada pada patokan penduduk berstruktur tua yaitu 7 persen.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk lansia memberikan konsekuensi yang banyak terhadap berbagai aspek kehidupan. Sejalan dengan proses penuaan, kondisi fisik maupun

nonfisik lansia mengalami penurunan. Sebagai konsekuensinya diperlukan peningkatan kebutuhan pelayanan bagi penduduk lansia, khususnya pelayanan sosial.

Berbagai permasalahan lansia, misalnya dilihat dari segi ekonomi, lansia sudah tergolong penduduk yang tidak produktif lagi. Jumlah penduduk lansia semakin meningkat, maka *old dependency ratio* semakin meningkat pula, yang berakibat pada peningkatan beban tanggungan penduduk usia produktif (Cicik, 2005).

**Tabel 1.2 Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia)
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka, 2017-2021**

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	8,93	10,51	9,76
2018	8,95	10,54	9,79
2019	9,07	10,85	10,01
2020	9,41	11,12	10,31
2021	10,44	12,45	11,50

Sumber : BPS, Susenas 2017-2021

Beban Tanggungan

Perubahan komposisi penduduk menurut umur di atas memberi dampak pada angka beban ketergantungan yang menggambarkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif (65 tahun ke atas dan kurang dari 15 tahun) untuk suatu periode waktu tertentu. Menurut konsep, penduduk muda di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografis.

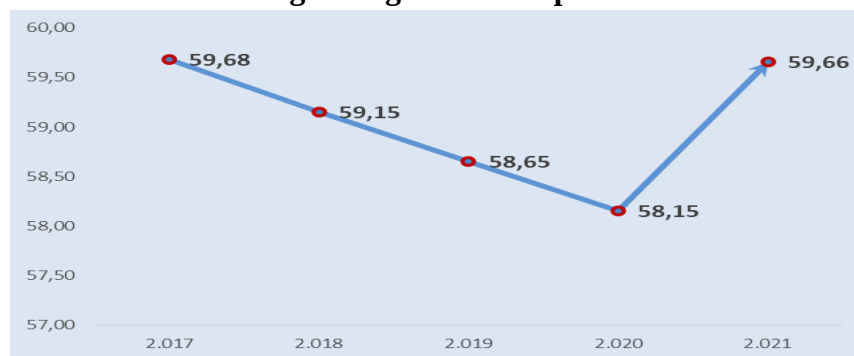
Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang berkembang. Angka beban ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 1.3 Rasio Beban Ketergantungan Di Kabupaten Sikka 2017 - 2021

Tahun	Rasio Beban Ketergantungan		Total
	Anak	Lanjut Usia	
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	49,53	10,15	59,68
2018	48,95	10,20	59,15
2019	48,37	10,28	58,65
2020	47,75	10,40	58,15
2021	47,89	11,76	59,66

Sumber : BPS, Susenas 2017 – 2021

Gambar 1.2 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021



Sumber : BPS, Susenas 2017-2021

Selama periode 2017-2020, terlihat angka beban ketergantungan di Kabupaten Sikka mengalami penurunan, namun di tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 59,68 menjadi 59,15 di tahun 2018 kemudian turun menjadi 58,65 di tahun 2019 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 58,15 namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 59,66. Bila dilihat

menurut angka beban tanggungan penduduk muda (usia 0-14 tahun) dan angka beban tanggungan penduduk tua (usia 65 tahun ke atas), maka pada tahun 2021 angka ketergantungan penduduk tua sebesar 11,76 dan angka ketergantungan penduduk muda sebesar 47,89. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 11-12 orang penduduk usia 65 tahun ke atas dan sekitar 47-48 orang penduduk usia 0-14 tahun. Berdasarkan angka yang disajikan pada Tabel 1.3 maka tampak bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif di Kabupaten Sikka masih didominasi oleh penduduk muda.

Rasio Jenis Kelamin

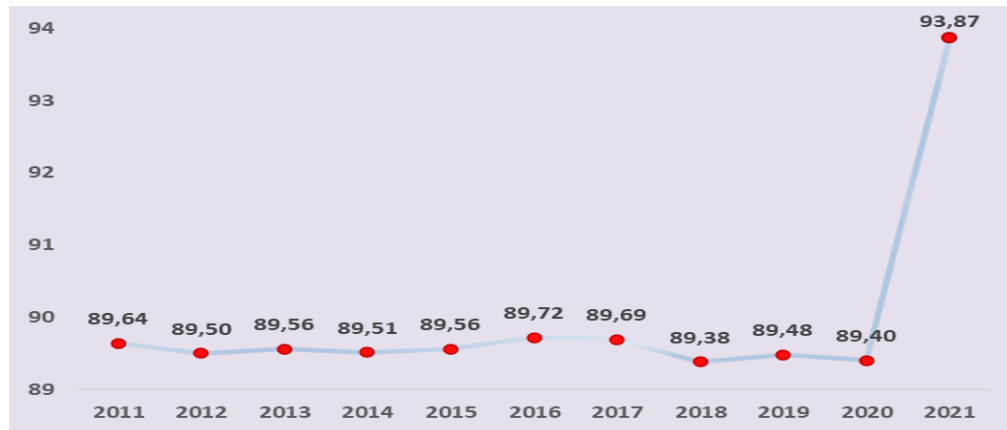
Perkembangan komposisi penduduk menurut jenis kelamin ditunjukkan dengan perkembangan rasio jenis kelamin (RJK), yaitu perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

**Tabel 1.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sikka
2011 – 2021**

Tahun	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)
2011	89,64
2012	89,50
2013	89,56
2014	89,51
2015	89,56
2016	89,72
2017	89,69
2018	89,38
2019	89,48
2020	89,40
2021	93,87

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk

Gambar 1.3 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2011-2021



Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk

Selama pelaksanaan sensus dan survei di Kabupaten Sikka angka ini masih di bawah 100, yang berarti penduduk perempuan di Kabupaten Sikka lebih besar dibanding penduduk laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah ini cenderung ditinggalkan merantau oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Rasio jenis kelamin (RJK) berbeda antar kelompok umur. Umumnya pada kelompok umur muda RJK di atas 100 artinya lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Pada kelompok umur selanjutnya, RJK semakin turun dan semakin kurang dari 100, artinya penurunan jumlah penduduk laki-laki lebih cepat dibanding pada penduduk perempuan. Terjadinya fenomena seperti ini antara lain disebabkan karena usia harapan hidup perempuan lebih panjang dibanding laki-laki.

Pada Tabel 1.4 terlihat bahwa sejak tahun 2011-2020 rasio jenis kelamin cenderung tetap berada pada rentang 89 dan naik menjadi 93 pada tahun 2021 dimana sebesar 89,64 pada tahun 2011 dan 93,87 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 93-94 laki-laki pada setiap 100 perempuan.

Status Perkawinan

Perkawinan merubah status seseorang dari bujangan atau janda/duda menjadi berstatus kawin. Dalam demografi status perkawinan penduduk dapat dibedakan menjadi status belum pernah menikah, menikah, pisah atau cerai, janda atau duda. Di daerah dimana pemakaian KB rendah, rata-rata umur penduduk saat menikah pertama kali serta lamanya seseorang dalam status perkawinan akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat fertilitas. Usia kawin dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencanaan program karena berisiko tinggi terhadap

kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang berisiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orangtua yang bertanggung jawab.

Konsep perkawinan dalam lingkup demografi dan kependudukan lebih difokuskan kepada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam kurun waktu yang lama. Dalam hal ini hidup bersama dapat dikukuhkan dengan perkawinan yang sah sesuai dengan undang-undang atau peraturan hukum yang ada (perkawinan *de jure*) ataupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*). Konsep ini dipakai terutama untuk mengkaitkan status perkawinan dengan dinamika penduduk terutama banyaknya kelahiran yang diakibatkan oleh panjang-pSikkaknya perkawinan atau hidup bersama ini.

Norma dan adat di Indonesia menghendaki adanya pengesahan perkawinan secara agama maupun secara undang-undang. Tetapi untuk keperluan studi demografi, Badan Pusat Statistik (BPS) mSikkafinisikan seseorang berstatus kawin apabila mereka terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik yang tinggal bersama maupun terpisah, yang menikah secara sah maupun yang hidup bersama yang oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sah sebagai suami istri. Definisi luas tentang perkawinan ini digunakan BPS karena dalam kenyataannya pada suatu masyarakat sering ditemukan banyak pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Seringkali hal ini disebabkan karena persyaratan perkawinan yang sah memberatkan kedua belah pihak yang hendak menikah, misalnya biaya perhelatan adat yang terlampau tinggi, tidak mampu membayar biaya memproses perkawinan yang sah atau biaya mahar yang tidak terjangkau oleh pasangan yang hendak menikah secara resmi.

Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan, terutama dalam hal pengembangan program-program peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga. Perkawinan usia dini akan berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari sisi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga, maupun kesiapan fisik bagi calon Ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya. Dalam hal kehamilan yang tidak dikehendaki karena usia calon Ibu masih sangat muda, ada risiko pengguguran kehamilan yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman secara medis. Pengguguran kandungan semacam ini dapat berakibat komplikasi aborsi. Program konseling maupun pelayanan kesehatan reproduksi remaja akan dapat dilakukan secara tepat apabila mengetahui berapa banyaknya dan dimana perkawinan usia dini terdapat.

Diketahuinya berapa besar pasangan usia subur (persentase perempuan usia subur yang menikah) akan memudahkan para perencana program KB untuk mempersiapkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dan dikemudian hari anak-anak yang dilahirkan para Ibu ini akan menjadi generasi yang sehat dan berpotensi tinggi sebagai sumber daya manusia yang handal. Dari sisi lain, data mengenai banyaknya pasangan suami isteri serta rata-rata umur kawin laki-laki dan perempuan akan menjadi bahan utama pengembangan kebijakan penyediaan pelayanan dasar lainnya seperti pengembangan perumahan, kebutuhan peralatan rumah tangga disesuaikan dengan kemampuan daya beli, keperluan alat transportasi, dan lain-lain.

Tabel 1.5 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Sikka Tahun 2017 – 2021

Status Perkawinan/Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belum Kawin :					
- Laki-laki	42,03	46,64	41,19	40,71	37,37
- Perempuan	36,07	36,33	36,31	35,63	33,99
Kawin :					
- Laki-laki	53,90	52,57	54,37	55,58	59,53
- Perempuan	50,63	58,87	50,86	51,63	54,37
Cerai hidup :					
- Laki-laki	0,99				
- Perempuan	2,48	0,79	4,44	3,72	3,10
Cerai mati :		4,80	12,83	12,74	11,64
- Laki-laki	3,08				
- Perempuan	10,81				

Sumber : BPS, Susenas 2017 - 2021

Distribusi atau komposisi penduduk menurut status perkawinan, baik untuk penduduk perempuan, maupun penduduk laki-laki seperti yang disajikan pada Tabel 1.5. Dari tabel tersebut nampak bahwa persentase penduduk perempuan yang berstatus cerai baik cerai hidup atau cerai mati (berkisar antara 11 - 12 persen) cenderung lebih tinggi dari laki-laki (antara 3 – 4 persen) pada periode tahun 2021.

Ada beberapa alasan yang bisa menerangkan fenomena yang melatar-belakangi persentase penduduk perempuan yang bercerai cenderung lebih tinggi dari penduduk laki-laki. Salah satu alasannya adalah dari beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan BPS (BPS 1993 dan 1997) mengungkapkan bahwa laki-laki yang bercerai akan segera menikah atau membentuk rumah tangga baru, sementara perempuan cenderung untuk memfokuskan perhatian mereka untuk mengurus anak-anaknya hingga mampu hidup mandiri.

Salah satu faktor dalam perkawinan yang menentukan tingkat fertilitas adalah umur kawin pertama perempuan. Dalam konteks ini umur kawin pertama dianggap menunjukkan saat pertama kali orang mengalami hubungan seksual. Faktor ini mempengaruhi fertilitas karena berkaitan dengan panjangnya interval masa subur mereka, semakin dini umur perkawinan pertama dilangsungkan, semakin panjang interval masa subur tersebut, sehingga semakin tinggi pula resiko untuk melahirkan anak. Selain itu, dengan tersedianya indikator rata-rata usia kawin pertama yang rendah dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga menikah muda dan meninggalkan bangku sekolah.

Umur perkawinan pertama yang rendah atau perkawinan yang dilakukan dalam usia belia akan memiliki dampak pada kesehatan reproduksi. Secara psikologis, pasangan usia muda tersebut belum sepenuhnya siap untuk menjadi pasangan suami istri dan menjadi orang tua. Secara medis, perkawinan belia bagi wanita biasanya dikaitkan dengan tingginya risiko gangguan kesehatan pada sistem, fungsi dan proses reproduksi bahkan sampai pada risiko kematian maternal dan bayi yang dikandung, yang kesemuanya ini akan mengganggu fungsi-fungsi sosial mereka dalam keluarga maupun masyarakat (Asmanedi 1999). Selain itu, dari berbagai hasil penelitian menemukan bahwa faktor power orang tua dalam kehidupan anak sangat berperan menentukan kapan sang anak harus kawin. Masih ada pandangan bahwa menstruasi pertama bagi seorang gadis merupakan tanda kedewasaan yang kemudian mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya.

Halaman Kosong

<https://sikkakabps.go.id>

2

KESEHATAN & GIZI

Persentase Balita Yang Pernah
Mendapat Imunisasi
Menurut Cakupan Imunisasi, 2021



90,49%

95,86%

BCG

82,00%

92,00%

DPT

88,85%

95,13%

Polio

64,03%

77,96%

MMR

95,53%

99,54%

Hep B

BAB II

KESEHATAN DAN GIZI

Menurut UU kesehatan tahun 1992, kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat atau kualitas kesehatan yang tinggi merupakan salah satu hak dasar (*fundamental right*) dari setiap manusia tanpa harus membedakan suku, bangsa, agama, aliran politik, keadaan ekonomi dan sosialnya (Konstitusi WHO 1948). Menurut Broto (2003), kualitas kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkait, saling berpengaruh dan saling berinteraksi seperti misalnya kondisi lingkungan, gaya hidup (*life style*), demografi, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.

Di dalam laporan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO 2000 dalam Ambar 2002), ada tiga tujuan fundamental dari sebuah sistem kesehatan: *pertama*, meningkatkan kesehatan warga negara; *kedua*, merespons kebutuhan dan harapan warga negara akan kesehatan; dan *ketiga* adalah melindungi penduduk miskin dari pembiayaan kesehatan yang mahal ketika mereka jatuh sakit.

Selanjutnya menurut Broto (2003) kesehatan adalah salah satu unsur dari pembangunan, karena ia sangat berpengaruh terhadap mutu dari SDM yang ikut menggerakkan pembangunan tersebut. Kesehatan pada masa kini dianggap sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga kesehatan selalu digunakan sebagai indikator kebijakan ekonomi. Ia tidak boleh dipandang sebagai suatu pelayanan (*service*) atau penampungan bagi mereka yang menderita (*safety net*) belaka tetapi kesehatan dipandang sebagai suatu investasi ekonomi.

Kesehatan yang baik akan mempunyai peran penting dalam memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi melalui empat cara (World Bank 1993 dalam Broto 2003) yaitu pertama, berkurangnya kerugian produksi akibat absensi tenaga kerja karena sakit. Kedua, penduduk dapat lebih mampu memanfaatkan sumber-sumber alam (*natural resources*). Ketiga, anak-anak dapat masuk sekolah secara teratur dan mempunyai kemampuan belajar yang lebih baik. Keempat, pendapatan dan tabungan tidak terkuras untuk mengobati penyakit yang mungkin sangat mahal ongkosnya.

Pada bab ini diulas beberapa indikator kesehatan. Indikator utama yang biasa digunakan untuk melihat derajat kesehatan adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain derajat kesehatan, aspek penting lainnya adalah status kesehatan yang antara lain dapat diukur

dari beberapa indikator seperti angka kesakitan dan status gizi. Beberapa indikator pemanfaatan fasilitas kesehatan seperti penolong persalinan dapat memberikan gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan derajat dan status kesehatan masyarakat.

Morbiditas

Status kesehatan masyarakat diukur dengan menggunakan angka kesakitan yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang selama satu bulan terakhir mempunyai satu atau lebih keluhan kesehatan, antara lain seperti panas, batuk, pilek, asma, diare, sakit gigi, yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari (seperti pekerjaan, sekolah, dan kegiatan lainnya). Keluhan kesehatan yang dimaksud di sini adalah sepenuhnya berdasarkan pengakuan dari responden, bukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter atau petugas kesehatan lainnya.

Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk; oleh karena, misalnya, pekerja tidak mengalami gangguan kesehatan akan dapat bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih lama dan bekerja lebih optimal. Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan indikator angka kesakitan (morbidity rate) dan lama hari sakit.

Tabel 2.1. Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka, Tahun 2021

Jenis Keluhan Kesehatan	2021	
	L	P
(1)	(2)	(3)
☐ Mengalami keluhan kesehatan	16,43	18,06
☐ Berobat jalan dan menggunakan jaminan kesehatan	59,44	70,97

Sumber : BPS, Susenas 2021

Data Susenas 2021 menunjukkan bahwa tingkat keluhan kesehatan di Kabupaten Sikka adalah sebesar 16,43 persen untuk penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan yaitu 18,06 persen. Dari 16,43 persen penduduk laki-laki yang mempunyai keluhan kesehatan pada tahun 2021 ada sebanyak 59,44 persen yang berobat jalan dan menggunakan jaminan kesehatan. Dari 18,06 persen penduduk perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan pada tahun 2021 ada sebanyak 70,97 persen yang berobat jalan dan menggunakan jaminan kesehatan.

Status Gizi Balita

Salah satu faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan balita adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu). ASI merupakan zat makanan yang paling ideal terutama untuk pertumbuhan bayi karena selain bergizi juga mengandung zat pembentuk kekebalan terhadap beberapa penyakit. Data Susenas 2021 menunjukkan bahwa pada umumnya ibu di Kabupaten Sikka memberikan ASI kepada 99,72 persen bayi laki-laknya dan kepada 97,61 persen bayi perempuannya. Selain itu jika dilihat berdasarkan rata-rata lama pemberian ASI, bayi laki-laki dan perempuan rata-rata disusui selama 8 - 9 bulan. Tidak ada perbedaan signifikan antara bayi perempuan dan bayi laki-laki. (Lihat Tabel 2.2)

**Tabel 2.2 Persentase Anak Usia 0-23 Bulan
Menurut Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan)
Di Kabupaten Sikka, 2021**

Lama Disusui (bulan)	Laki-laki	Perempuan	Total
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
□ Pemberian ASI (%)	99,72	97,61	98,67
□ Rata-rata lama pemberian ASI (Bulan)	8,77	8,72	8,75

Sumber : BPS, Susenas 2021

Selain kekebalan yang dimiliki sejak dalam kandungan, bayi memerlukan kekebalan buatan melalui imunisasi untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh dalam upaya pencegahan terhadap suatu penyakit tertentu. Pada umur satu tahun, bayi sebaiknya telah mendapatkan imunisasi lengkap, yaitu BCG, DPT 3 kali, Polio 3 kali, dan campak. Balita di Kabupaten Sikka yang pernah mendapat imunisasi lengkap pada tahun 2021 angkanya mencapai 64,73 persen. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 35,27 persen balita yang belum mendapat imunisasi lengkap.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) Yang Pernah Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin, 2021

Jenis Kelamin	Sikka
(1)	(2)
- Laki-laki	69,71
- Perempuan	59,76
Jumlah	64,73

Sumber: BPS, Susenas 2021

Pada balita yang pernah mendapat imunisasi lengkap di Kabupaten Sikkapada tahun 2021, jika dilihat menurut cakupan imunisasi, menunjukkan bahwa cakupan imunisasi BCG, Polio, dan Hepatitis B sudah mencapai lebih dari 91 persen kecuali DPT dan Campak/MMR yang masing-masing sebesar 87 persen dan 71 persen, yang berarti belum mencapai cakupan imunisasi universal (UCI). (Lihat Tabel 2.4)

Tabel 2.4 Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Cakupan Imunisasi, 2021

Cakupan Imunisasi	SIKKA		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
- BCG	95,86	90,49	93,17
- DPT	92,00	82,00	87,00
- Polio	95,13	88,85	91,99
- Campak/MMR	77,96	64,03	71,00
- Hepatitis B	99,54	95,53	97,54

Sumber : BPS, Susenas 2021

Penolong Persalinan

Sumber daya manusia yang berkualitas harus dipersiapkan sejak dini, dengan demikian kesehatan balita yang merupakan generasi penerus mutlak diperhatikan. Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu (status gizi sebelum dan sesudah kehamilan) dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah proses penolong kelahiran.

Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter, bidan, dan paramedis dianggap lebih baik dari kelahiran yang ditolong tenaga nonmedis (dukun, famili, atau lainnya). Secara umum, sebagian besar kelahiran balita ditolong oleh tenaga medis. Pada tahun 2021, persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan dimana proses kelahirannya ditolong oleh tenaga medis di Kabupaten Sikka sebesar 98,75 persen. Sedangkan 1,25 persen diantaranya, proses kelahirannya ditolong oleh tenaga non medis. Balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga nonmedis (dukun, famili dan lainnya) sebagian besar persalinannya ditolong oleh dukun. Namun demikian peranan tenaga medis masih cukup dominan dalam proses persalinan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa masyarakat (ibu hamil) semakin sadar akan kesehatan khususnya kesehatan dan keselamatan bayi dan ibu.

Tabel 2.5. Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan menurut Penolong Persalinan di Kabupaten Sikka, 2021

Penolong Persalinan	Sikka
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
☐ Tenaga Medis	98,75
☐ Tenaga Non Medis	1,25
Total	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2021

Halaman Kosong

<https://sikkakab.bps.go.id>

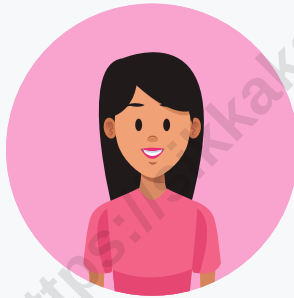
3

PENDIDIKAN

Angka Melek Huruf Latin
Penduduk Kabupaten
Sikka Menurut Jenis
Kelamin, 2021



96,03

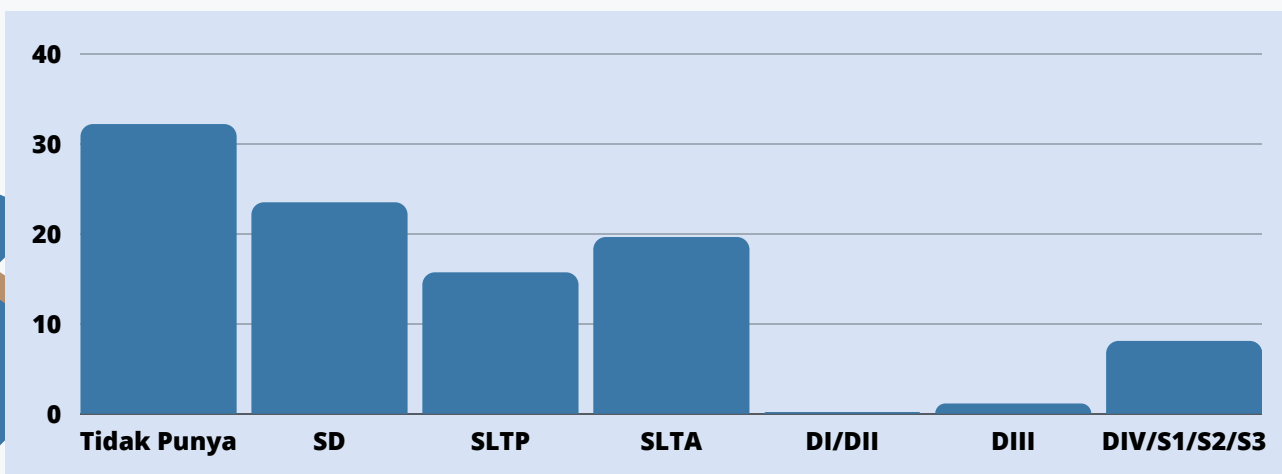


94,66

Rata-rata Lama
Sekolah Kabupaten
Sikka, 2021

6,95
(setingkat
kelas 6 SD
hingga kelas 1
SMP)

Persentase Penduduk Kabupaten Sikka Berumur
15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang
Dimiliki, 2021



BAB III

PENDIDIKAN

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan yang dilakukan dalam suatu wilayah. Apalagi dengan kondisi globalisasi yang ditandai dengan persaingan yang makin kompetitif di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kondisi SDM yang berkualitas rendah tentu akan merugikan pembangunan yang dijalankan oleh suatu wilayah, yang pada akhirnya berdampak pada masyarakatnya sendiri dengan tidak tercapainya tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bersama-sama dengan sektor kesehatan, pendidikan menjadi penting dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Pendidikan dapat dianggap sebagai sarana investasi yang mampu membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tenaga kerja sebagai modal untuk dapat bekerja lebih produktif sehingga dapat meningkatkan penghasilannya di masa datang (Suryadi 1999 dalam Prihastuti 2007).

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Sikka telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Wajib Belajar 6 tahun, yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan Wajib Belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses. Pada tahun 2021, angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar sebesar 97,32 persen, APM tingkat SMP sebesar 69,36 persen, dan APM SMA sebesar 52,98 persen.

Tetapi dibalik keberhasilan program-program tersebut, terdapat berbagai fenomena dalam sektor pendidikan. Kasus tinggal kelas, terlambat masuk sekolah dasar dan ketidakmampuan untuk meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi merupakan hal yang cukup banyak menjadi sorotan di dunia pendidikan. Kasus putus sekolah yang juga banyak terjadi terutama di daerah perdesaan menunjukkan bahwa pendidikan belum banyak menjadi prioritas bagi orang tua. Rendahnya prioritas tersebut antara lain dipicu oleh akses masyarakat terhadap pendidikan yang masih relatif kecil, terutama bagi keluarga miskin yang tidak mampu membiayai anak mereka untuk meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari penduduk sebagai target. Informasi jumlah penduduk khususnya penduduk usia sekolah di masa kini dan di masa depan penting diketahui agar dapat dipersiapkan berbagai fasilitas pendidikan menyangkut sarana dan prasarana

pendidikan termasuk tenaga pengajar yang dibutuhkan. Sebab, kualifikasi tenaga pengajar turut menentukan keberhasilan pendidikan. Bukan hanya kualifikasi pengajar namun juga kesesuaian bidang keahlian yang diajarkan. Rendahnya kualifikasi tenaga pengajar atau guru menunjukkan masih rendahnya mutu pendidikan. Rendahnya kualitas tenaga pengajar akan berdampak pada kualitas siswa yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya mutu para lulusan. Sehingga pendidikan tidak hanya bertumpu pada kuantitas namun juga kualitas anak didik sebagai persiapan memasuki dunia kerja.

Perkembangan jumlah penduduk usia sekolah merupakan informasi penting berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan antara lain fasilitas gedung sekolah dan tenaga pengajar. Dengan mengetahui informasi tentang jumlah penduduk usia sekolah dapat diperkirakan kebutuhan fasilitas gedung sekolah dan tenaga pengajar yang dibutuhkan di suatu wilayah. Walaupun tidak semua penduduk usia sekolah benar-benar duduk di bangku sekolah. Hal ini disebabkan karena sebagian dari mereka tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi karena tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya atau putus sekolah. Jumlah penduduk usia sekolah yang benar-benar masih sekolah dapat diketahui dengan menghitung Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Selanjutnya untuk melihat gambaran umum pendidikan di Kabupaten Sikka, berikut ini akan dibahas beberapa indikator *output* yang biasa digunakan untuk melihat hasil pembangunan di bidang pendidikan antara lain seperti angka buta huruf, angka partisipasi sekolah, dan tingkat pendidikan.

Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan untuk dapat menuju hidup sejahtera, mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial-ekonomi suatu bangsa atau wilayah. Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Dari tabel 3.1. terlihat bahwa secara keseluruhan, pada tahun 2021 angka melek huruf penduduk Kabupaten Sikka masih diatas 90 persen baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf masih di bawah 10 persen.

**Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk Kabupaten Sikka
Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2021**

Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Total
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
➤ Huruf Latin	96,03	94,66	95,30
➤ Huruf Lainnya	1,80	1,57	1,67

Sumber : BPS, Susenas 2021

Partisipasi Sekolah

Jumlah penduduk usia sekolah sebagai target peserta didik, belum menunjukkan jumlah siswa yang duduk di bangku sekolah. Jumlah siswa sekolah dapat ditunjukkan dengan beberapa ukuran antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APS menunjukkan siswa berumur 5-18 tahun yang sekolah. Sedangkan APK menunjukkan siswa yang sekolah di setiap jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah dapat digunakan untuk menunjukkan sampai sejauh mana kemajuan pembangunan pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah, menunjukkan kondisi pendidikan yang semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah angka partisipasi sekolah menunjukkan kondisi pendidikan yang tidak cukup baik.

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Bila ukuran seperti perubahan jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan jumlah murid sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi sekolah. Namun, bila digunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD.

Gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk pada umumnya dapat dilihat pada beberapa indikator, antara lain angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kotor (APK) dan angka partisipasi murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan jumlah siswa di masing-masing kelompok usia sekolah dibagi jumlah penduduk pada kelompok umur bersangkutan misalnya APS usia 7-12 tahun adalah jumlah siswa berusia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, dan seterusnya untuk kelompok usia 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Dalam hal ini bisa saja siswa berusia 12 tahun sudah duduk di bangku SMP atau siswa berusia 16 tahun tetapi masih duduk di bangku SMP.

Dari angka partisipasi sekolah (APS) dapat dilihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada. Meningkatnya partisipasi sekolah menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Dalam konteks penuntasan Program Wajib Belajar (Wajar) 9 (sembilan) Tahun, angka partisipasi sangat krusial, karena berhubungan dengan sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai angka partisipasi 100 persen di jenjang SLTP. Berdasarkan data Susenas 2021 APS penduduk usia 7-12 tahun yaitu sebesar 97,32 persen, APS penduduk usia 13-15 tahun mencapai sekitar 93,30 persen dan APS penduduk usia 16 -18 tahun adalah 74,53 persen.

**Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten Sikka, Tahun 2021**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12	95,70	99,01	97,32
13 – 15	94,36	91,94	93,30
16 – 18	77,93	71,09	74,53

Sumber : BPS, Susenas 2021

Seperti APS, Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partispasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Pada tahun 2017-2021 di Kabupaten Sikka cenderung terjadi peningkatan APM pada jenjang pendidikan SD masing-masing sebesar 95,00 persen tahun 2017 menjadi 97,32 persen pada tahun 2021. Begitupun terjadi sama pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA (lihat Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Sikka Tahun 2017– 2021

Jenjang Pendidikan (Kelompok Umur)	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
- SD (7-12 Tahun)	95,00	96,21	96,80	96,71	97,32
- SLTP (13-15 Tahun)	64,14	67,80	66,94	68,97	69,36
- SLTA (16-18 Tahun)	49,38	53,18	52,36	52,48	52,98

Sumber : BPS, Susenas 2017-2021

Kemajuan pembangunan pendidikan bukanlah hal mudah untuk dicapai. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan antara lain rendahnya jangkauan (*coverage*) dan akses pada pelayanan pendidikan terutama bagi penduduk kurang mampu dan penduduk yang tinggal di perdesaan atau daerah terpencil. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah terutama jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

Rendahnya partisipasi sekolah yang antara lain disebabkan oleh masih rendahnya jangkauan (*coverage*) dan akses pada pendidikan, bukan satu-satunya penghambat kemajuan pendidikan. Kemiskinan dan biaya sekolah yang tinggi turut menjadi penyebab rendahnya partisipasi sekolah masyarakat. Kemiskinan dan tingginya biaya sekolah menjadi pemicu banyaknya siswa yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Lama Bersekolah

Lama sekolah merupakan jangka waktu anak belajar di sekolah, dan dihitung berdasarkan tahun sukses yaitu tahun dimana seseorang berhasil menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang kelas/tingkat tertentu. Dalam bagian ini, dihitung berapa lama anak menduduki bangku

sekolah mulai dari SD sampai tamat perguruan tinggi. Di Kabupaten Sikka, rata-rata lama sekolah masih sangat rendah yaitu diantara 6 - 7 tahun (Tabel 3.4).

Secara umum berapa lama seseorang dapat bertahan di bangku pendidikan formal sangat berkaitan dengan masalah sosial ekonomi. Hal ini pula yang diduga menjadi sumber perbedaan antara kelompok di atas. Penduduk di daerah perkotaan yang lebih mapan dari sisi pendapatannya tentu lebih mampu membiayai pendidikannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di daerah perdesaan. Di samping itu ketersediaan sarana/prasarana dan nilai pendidikan dalam masyarakat sangat mempengaruhi kondisi yang ada.

Tabel 3.4 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka, 2019-2021

Wilayah	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
- Sikka	6,71	6,94	6,95
- NTT	7,55	7,63	7,69

Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pendidikan Yang Ditamatkan

Hasil pendidikan merupakan hasil yang diperoleh dari adanya proses belajar-mengajar sebagai bagian dari proses pendidikan, yang dapat ditunjukkan dari jumlah penduduk yang berhasil tamat atau jumlah lulusan menurut jenjang pendidikan tertentu. Hal ini secara spesifik dapat dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk berumur 10 tahun ke atas. Komposisi penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan memberikan gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya manusia.

Dilihat dari jumlah penduduk yang berhasil tamat pada jenjang pendidikan tertentu dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Sikka masih jauh dari harapan, namun berangsur menurun, dimana sampai saat ini (dari data Susenas 2021), sekitar 32,12 persen (tanpa melihat yang belum tamat SD atau yang belum pernah sekolah) belum/tidak tamat SD. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu 23,43 persen. Angka ini ada peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 yang berkisar 21,73 persen. Sedangkan penduduk yang tamat SLTP dan SLTA (SMU dan SMK), masing-masing sebesar 15,65 persen dan 19,57 persen, serta penduduk yang tamat pada pendidikan tinggi (tingkat universitas), untuk

jenjang Diploma I/II sebesar 0,13 persen, jenjang Diploma III sebesar 1,08 persen, dan jenjang Diploma IV ke atas sebesar 8,03 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sikka, karena angka tertinggi adalah pada penduduk yang tidak/belum memiliki ijazah (lihat Tabel 3.5).

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Kabupaten Sikka Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki, Tahun 2017– 2021

Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
o Tidak punya	41,01	39,19	38,56	32,04	32,12
o Sekolah Dasar	23,50	23,89	19,55	21,73	23,43
o SLTP	13,66	17,03	17,46	18,22	15,65
o SLTA	15,35	12,00	24,43*	18,65	19,57
o Diploma I/II	0,84	0,39		0,28	0,13
o Diploma III / Sarjana Muda	1,52	1,70		1,90	1,08
o Diploma IV/S ₁ /S ₂ /S ₃	4,12	5,80		7,18	8,03

Keterangan: * SLTA keatas

Sumber : BPS, Susenas 2017-2021

Rendahnya pendidikan mencerminkan rendahnya kualitas angkatan kerja di Kabupaten Sikka saat ini bahkan sampai beberapa puluh tahun mendatang. Hal ini akan dirasakan ketika mereka memasuki pasar kerja karena persaingan dunia kerja yang menuntut pekerja dengan kualifikasi pendidikan yang semakin tinggi. Mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan pendidikan di semua jenjang pendidikan, dengan memperluas akses dan pelayanan serta pemerataan pendidikan terutama bagi penduduk perempuan, penduduk miskin, dan yang tinggal di perdesaan atau daerah terpencil.

Fasilitas Pendidikan

Meningkatnya partisipasi penduduk dalam pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seharusnya sejalan dengan peningkatan fasilitas pendidikan. Perkembangan fasilitas pendidikan disajikan pada Tabel 3.6. Tabel tersebut memperlihatkan rasio Murid-Guru. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Dalam periode tahun ajaran 2019/2020 rasio guru terhadap jumlah murid sudah cukup bagus yaitu terdapat 1 guru untuk setiap 13-15 murid. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi tenaga Pendidikan di Kabupaten Sikka sudah cukup bagus. Selain itu rasio murid terhadap sekolah untuk Pendidikan SD-SLTA berkisar dari 123-436 murid per sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan juga sudah cukup bagus.

Tabel 3.6. Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid – Sekolah di Kabupaten Sikka Tahun Ajaran 2020/2021

Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran 2020/2021					
	Sekolah	Guru	Murid	Rata-rata Guru/Sekolah	Rata-rata Murid/Sekolah	Rasio Murid/Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
o SD	335	3.183	41.045	10	123	13
o SLTP	85	1.326	18.507	16	218	14
o SMK	17	537	7.419	32	436	14
o SLTA	23	655	9.809	28	426	15

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kab. Sikka

Halaman Kosong

4

KETENAGAKERJAAN

TPAK

TPT



73,92

4,54

Komposisi Penduduk Kabupaten Sikka yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2021

37,52

Primer

37,52

Sekunder

37,52

Tersier

Keterangan :

- **Primer = Pertanian**
- **Sekunder = Industri Pengolahan, Listrik & Air Minum, dan Bangunan.**
- **Tersier = Sektor Perdagangan, Angkutan, Keuangan dan Jasa.**

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah dapat dipandang sebagai refleksi perekonomian dari wilayah tersebut. Sehingga perubahan perekonomian yang terjadi pada suatu wilayah akan berdampak pada masalah ketenagakerjaan yang diantaranya berkaitan dengan masalah pasar kerja di wilayah itu. Kondisi pasar kerja tersebut merupakan elemen penting dalam penentuan permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Permintaan terhadap barang dan jasa ini selanjutnya akan menentukan permintaan terhadap pekerja yang berarti juga mempengaruhi sisi penawaran pekerja. Selain itu, perubahan komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin menentukan siapa yang berpotensi masuk dalam pasar kerja, disamping mutu pendidikan juga mempengaruhi pasar kerja.

Secara teoritis, ketenagakerjaan (khususnya sisi penawaran tenaga kerja) dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk jumlah penduduk, struktur umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan riil dan distribusinya, angka upah riil, struktur ekonomi, partisipasi dalam sistem pendidikan, kebiasaan atau tradisi peran kerja dan partisipasi kerja. Tanpa pertambahan penduduk sekalipun, sebagian besar angkatan kerja di masa mendatang kini sudah lahir (Chotib, 2007).

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih.

Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.

Pembahasan mengenai ketenagakerjaan ini menarik karena beberapa alasan. **Pertama**, kita dapat melihat berapa besar jumlah penduduk yang bekerja. **Kedua**, kita dapat mengetahui jumlah pengangguran dan pencari kerja. **Ketiga**, apabila dilihat dari segi pendidikan maka hal ini akan mencerminkan kualitas tenaga kerja. **Keempat**,

dilihat dari statusnya dapat terlihat berapa jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal yang jaminan sosialnya baik, dan berapa yang bekerja di sektor informal. **Kelima**, pengetahuan tentang karakteristik dan kualitas tenaga kerja akan berguna sebagai dasar pengembangan kebijakan ketenagakerjaan, terutama pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas SDM yang akan dapat meminimalkan jumlah pengangguran di suatu wilayah. Hal ini penting karena tingginya angka pengangguran akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi masyarakat misalnya meningkatnya kriminalitas.

Terkait dengan hal ini, diperlukan indikator-indikator yang mampu menggambarkan keadaan angkatan kerja dan tenaga kerja untuk selanjutnya dijabarkan sebagai dasar penentuan arah kebijakan ketenagakerjaan. Dalam bab ini diulas secara singkat keadaan angkatan kerja dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selain TPAK, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi antara lain kesempatan kerja, lapangan dan status pekerjaan, dan jam kerja. Dari besaran indikator-indikator tersebut dapat diketahui keadaan ketenagakerjaan saat ini dan hal apa saja yang memerlukan perbaikan di masa depan.

TPAK dan Kesempatan Kerja

Tidak semua penduduk terjun ke pasar kerja untuk mencari pekerjaan. Secara teoritis, kelompok pertama yang dianggap tidak terjun ke pasar kerja adalah penduduk di luar usia kerja (di bawah 10 tahun). Kelompok kedua adalah mereka yang masuk usia kerja, tetapi dengan berbagai alasan, mereka tidak terjun ke pasar kerja. Yang termasuk dalam kelompok kedua ini adalah mereka yang tidak bekerja dan tidak berniat mencari pekerjaan (ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, orang sakit jiwa, dan kelompok apatis).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia kerja yang terjun ke pasar kerja (sebagai pekerja atau pencari kerja/penganggur) terhadap total penduduk usia kerja. Berdasarkan informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan dalam Sakernas terlihat bahwa keterlibatan penduduk usia 15 tahun keatas dalam angkatan kerja selama periode 2019-2021 mengalami peningkatan pada tahun 2021, yakni dari 65,51 persen pada tahun 2019 menjadi 73,92 persen pada tahun 2021.

Tabel 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Sikka Tahun 2019 - 2021

TPAK/TPT Sikka	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
➤ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK	65,51	73,42	73,92
➤ Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT	3,56	4,00	4,54

Sumber : BPS, Sakernas 2019-2021

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sikka sebesar 4,54 persen dari total angkatan kerja tahun 2021. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2019 (3,56 persen). Secara umum, angka pengangguran yang relatif rendah (di bawah 10 persen) tidak bisa dijadikan indikator bahwa tidak ada masalah dalam pasar kerja. Rendahnya angka pengangguran terbuka lebih disebabkan oleh ketidakmampuan penduduk untuk menganggur. Di Indonesia, sistem jaminan sosial (*social benefit*) bagi penganggur tidak ada, sehingga penduduk harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan umumnya di Indonesia, orang yang tidak bekerja adalah orang-orang yang

”mampu” untuk tidak bekerja karena sudah memiliki jaminan kehidupan, ketimbang bekerja dengan produktivitas yang rendah (Chotib, 2006-7).

Lapangan Pekerjaan

Proporsi penduduk yang bekerja (pekerja) menurut lapangan pekerjaan merupakan angka yang menunjukkan distribusi/penyebaran pekerja di setiap lapangan pekerjaan. Menurut konsep, yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, indikator tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Tabel 4.2. Komposisi Penduduk Kabupaten Sikka Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2021

Lapangan Usaha	2021
(1)	(2)
1. Primer	
❑ Laki-laki (L)	21,91
❑ Perempuan (P)	15,61
❑ L + P	37,52
2. Sekunder	
❑ Laki-laki	9,85
❑ Perempuan	11,94
❑ L + P	21,79
3. Tersier	
❑ Laki-laki	20,21
❑ Perempuan	20,48
❑ L + P	40,69

Sumber : BPS, Sakernas 2021

Keterangan : - Primer = Pertanian

- Sekunder = Industri Pengolahan, Listrik & Air Minum, dan Bangunan.

- Tersier = Sektor Perdagangan, Angkutan, Keuangan dan Jasa.

Pergeseran distribusi pekerja dari lapangan pekerjaan pertanian menuju industri dan jasa merupakan fenomena terjadinya transformasi/perubahan struktural

perekonomian. Di samping itu, indikator ini membantu pemerintah dalam memberikan fokus kebijakan ketenagakerjaan pemerintah. Misalnya, apabila proporsi penduduk yang bekerja terbanyak terdapat di sektor pertanian maka pemerintah dapat lebih menitikberatkan pembangunan ketenagakerjaan di sektor ini.

Tabel 4.2. memperlihatkan lapangan pekerjaan yang dimasuki oleh penduduk Kabupaten Sikka. Tampak bahwa sebagian besar pekerja di daerah ini telah beralih ke lapangan usaha jasa yakni sebesar 40,69 persen dari total penduduk yang bekerja. Dimana 20,21 persen adalah pekerja laki-laki dan 20,48 persen adalah pekerja perempuan. Hal ini didukung oleh semakin banyak lapangan pekerjaan di bidang jasa, dikarenakan semakin kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperoleh penghasilan.

Selama periode tahun 2021, sektor pertanian mempekerjakan 37,52 persen dari total penduduk yang bekerja. Nilai tersebut menurun dibandingkan tahun 2020. Sebagaimana diperlihatkan oleh Tabel 4.2, pada periode tahun 2021, mayoritas pekerja laki-laki masih bekerja pada sektor pertanian yakni sebesar 21,91 persen. Sedangkan pekerja perempuan hanya sebesar 15,61 persen karena mulai beralih ke industri dan jasa.

Status Pekerjaan

Statistik ketenagakerjaan membagi pekerja menurut status menjadi 5 golongan. Pertama, golongan yang berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain (status 1). Kedua, golongan yang berusaha dengan dibantu pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga atau buruh tidak tetap (status 2). Ketiga, golongan yang berusaha dengan dibantu pekerja dibayar atau buruh tetap (status 3). Keempat, buruh dan/atau karyawan (status 4). Dan status (5) pekerja keluarga/ pekerja tidak dibayar. Dalam perekonomian yang sedang berkembang, struktur pekerja menurut status seperti di atas juga mengalami pergeseran. Persentase pekerja yang termasuk status 1,2 dan 5 (pekerja sektor non formal) biasanya cenderung menurun, sementara pekerja status 3 dan 4 (sektor formal) meningkat.

Anwar dan Pungut (1992) menjelaskan proses pergeseran menurut status pekerjaan terjadi sejalan dengan kenaikan skala unit usaha dalam perekonomian. Dalam ekonomi yang sedang tumbuh, skala usaha biasanya mengalami kenaikan karena salah satu dari dua faktor berikut. Pertama, adanya kenaikan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa serta perbaikan sarana dan prasarana perhubungan. Sejalan dengan laju

pertumbuhan ekonomi biasanya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa mengalami kenaikan. Di pihak lain, sarana dan prasarana perhubungan semakin baik, sehingga jangkauan pemasaran dari tiap-tiap unit usaha menjadi semakin luas. Dengan demikian skala pada tiap-tiap unit usaha cenderung mengalami peningkatan. Kedua, adanya perubahan struktur produksi dengan sektor yang sensitif terhadap *economics of scale*, seperti sektor industri, cenderung makin meningkat kontribusinya. Dengan kata lain, selama pertumbuhan ekonomi berlangsung, terjadi transformasi dalam bentuk peningkatan skala unit usaha yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya perubahan struktur ketenagakerjaan menurut status pekerjaan.

Lebih lanjut, Anwar dan Pungut (1992) menjelaskan kenaikan skala tiap-tiap unit usaha biasanya tercermin pada kenaikan rata-rata pekerja tiap unit usaha. Dengan demikian kenaikan skala usaha tercermin antara lain dengan menurunnya persentase pekerja yang berusaha sendiri (status 1) di satu pihak dan meningkatnya persentase pekerja status 4 (buruh dan atau karyawan) dan status 5 (pekerja keluarga) di lain pihak. Selama perekonomian mengalami pertumbuhan secara berkesinambungan yang pada gilirannya menyebabkan skala usaha terus membesar, biasanya terjadi proses pergeseran pekerja dari status 2 menjadi status 3. Dengan kata lain, usaha-usaha yang hanya menggunakan pekerja keluarga atau buruh tidak tetap cenderung makin berkurang. Pergeseran dari status 2 menjadi status 3 ini membawa implikasi pada kenaikan persentase pekerja status 4.

Dari data struktur ketenagakerjaan yang disajikan pada Tabel 4.3, pada tahun 2021 terdapat indikasi ada perubahan rata-rata skala unit usaha dalam perekonomian di daerah ini yang tercermin antara lain adanya perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun kontribusi jumlah status buruh/karyawan dan status pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar terhadap jumlah penduduk yang bekerja, yakni masing-masing dari tahun 2017 sebesar 20,94 persen yang berstatus buruh/karyawan dan 19,43 persen yang berstatus pekerja keluarga, meningkat di tahun 2021 yakni sebesar 23,64 persen dan 21,54 persen.

Gambaran lain yang terjadi selama pertumbuhan ekonomi adalah perubahan status informal menjadi formal, yaitu selama pertumbuhan ekonomi juga akan terjadi penurunan peranan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar relatif terhadap pekerja berstatus buruh/karyawan. Secara rata-rata di Kabupaten Sikka, persentase buruh/karyawan tidak berbeda signifikan dengan persentase pekerja keluarga. Dari

Tabel 4.3 terlihat bahwa selama tahun 2017-2021 persentase buruh/karyawan berfluktuasi, begitupun dengan peranan pekerja keluarga, tetapi masih relatif lebih rendah dibandingkan persentase buruh/karyawan. Persentase pekerja keluarga yang tidak berbeda jauh dengan persentase buruh/karyawan di daerah ini diduga berhubungan dengan peranan yang besar dari sektor informal terutama sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja. Besarnya peranan sektor informal di daerah ini juga tercermin pada besarnya persentase pekerja yang dibantu buruh/pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Ada dua hal yang mempengaruhi pemanfaatan pekerja tidak dibayar ini (pekerja keluarga). Pertama, penghasilan pokok maupun sampingan sangat terbatas. Kedua, sempitnya lapangan pekerjaan di daerah ini.

Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Kabupaten Sikka Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2017-2020

Status Pekerjaan/ Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
➤ Berusaha sendiri	26,65	25,05	30,47	25,67	28,38
➤ Berusaha dibantu buruh/pekerja tidak tetap/pekerja tidak dibayar	26,25	23,82	17,30	24,77	20,79
➤ Berusaha dibantu buruh/pekerja tetap/ pekerja dibayar	3,15	1,91	2,91	3,22	2,04
➤ Buruh/karyawan	20,94	20,58	25,88	21,98	23,64
➤ Pekerja bebas	3,58	6,46	4,97	4,59	3,61
➤ Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga	19,43	22,18	18,47	19,77	21,54
➤ Formal	24,09	22,49	28,79	25,20	25,68
➤ Informal	75,91	77,51	71,21	74,80	70,71

Sumber :BPS, Sakernas 2017-2021

Umumnya jenis pekerjaan di sektor informal tidak membutuhkan persyaratan pendidikan dan keterampilan yang khusus, karenanya hampir semua orang bisa masuk ke dalam sektor ini jika ada kemauan dan sedikit modal. Hal ini berbeda dengan sektor formal yang membutuhkan pendidikan dan keterampilan khusus, sehingga hanya mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu yang bisa masuk ke sektor formal.

Data pada Tabel 4.3. mendukung dugaan yang dikemukakan hal tersebut di atas. Terlihat bahwa tampaknya sektor informal masih menjadi andalan bagi mayoritas

pekerja di Kabupaten Sikka sebagai sumber mata pencaharian, yakni dari 75,91 persen pada tahun 2017 dan berfluktuasi menjadi 70,71 persen pada tahun 2021. Masih besarnya persentase penduduk yang bekerja di sektor informal menunjukkan bahwa penduduk mampu menciptakan pekerjaan sendiri untuk bertahan hidup. Kebanyakan pekerja yang bekerja pada lapangan kerja informal bekerja pada sektor yang kurang produktif. Akibatnya, upah riil yang diterima relatif rendah dan mempengaruhi tingkat kesejahteraannya seperti pemenuhan pangan, sandang, dan papan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dapat ditempuh adalah i) perhatian dan proteksi terhadap sektor informal, ii) penetapan upah buruh yang layak, iii) pemantauan dinamika pasar kerja dan berbagai tindakan agar penciptaan lapangan kerja formal dapat terlaksana, dan iv) penumbuhan kelas menengah/wirausaha didorong dengan membangun iklim usaha yang sehat, mengutamakan produk dalam negeri, serta meningkatkan aksesnya terhadap modal (Chotib, 2007).

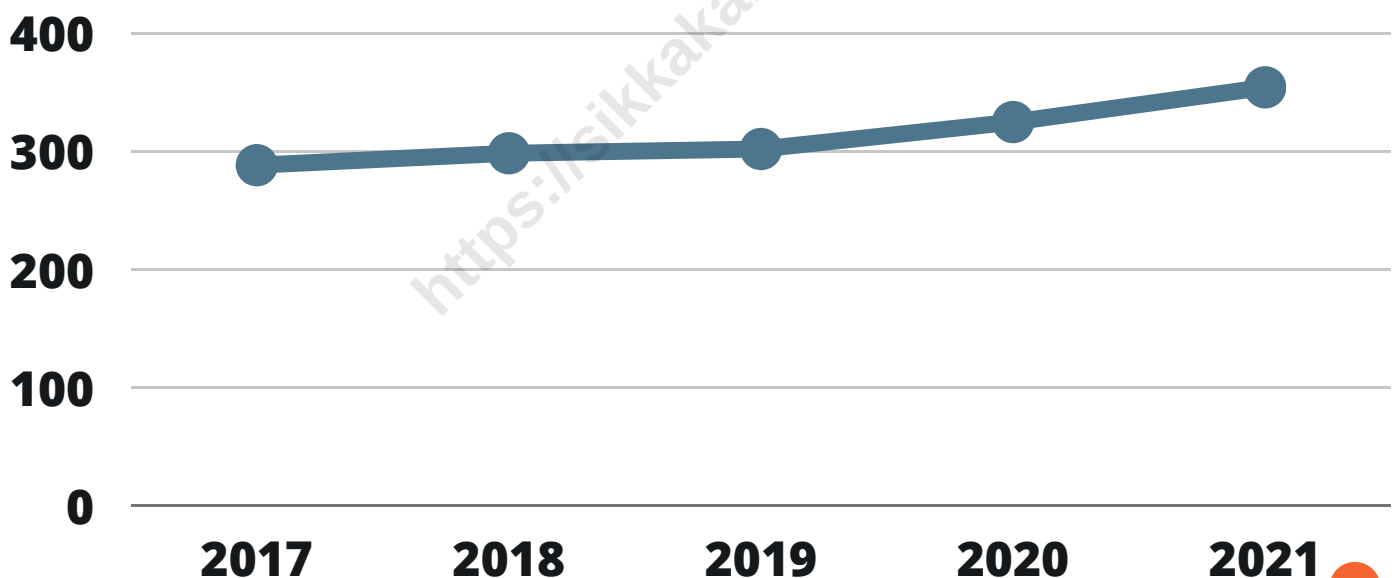
Sementara itu lapangan pekerjaan formal hanya dimasuki sebagian kecil saja pekerja tetapi keadaannya berfluktuasi namun cenderung meningkat yaitu dari 24,09 persen menjadi 25,68 persen dalam kurun tahun 2017-2021. Tampaknya hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan penduduk dimana tingkat pendidikan SLTP keatas sudah semakin meningkat.

Halaman Kosong

5

KEMISKINAN & POLA PENGELUARAN

Perkembangan Garis Kemiskinan
(Rp.000/kap/bulan) di Kabupaten Sikka,
2017-2021



43.100 (13,29%)

Jumlah Penduduk Miskin di
Kabupaten Sikka Tahun 2021

BAB V

KEMISKINAN DAN POLA PENGELUARAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Namun, mengentaskan kemiskinan itu ternyata sama peliknya dengan mendata orang miskin yang ada di Indonesia termasuk di Kabupaten Sikka ini. Dengan perkataan lain, mencari data kemiskinan adalah sama rumitnya dengan mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Bahkan untuk menentukan kriteria tentang kemiskinan itu sendiri bukan persoalan yang mudah.

Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Dalam kasus pengukuran kemiskinan (statistik kemiskinan), dilakukan kategorisasi yang membedakan keadaan 'miskin' dari 'kaya', penetapan tingkat-tingkat kemiskinan, dan acuan kemiskinan. Melalui upaya pengukuran kemiskinan ini, dapat dievaluasi ke arah mana perubahan masyarakat yang tengah terjadi sebagai dampak dari kebijakan publik yang ditujukan pada penanggulangan kemiskinan sebagai sasaran pembangunan. Bila ukuran-ukuran kemiskinan dapat dibakukan, dapat diperoleh keterbandingan capaian pembangunan antar daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan contoh ukuran pembangunan yang metode pengukurannya dibakukan secara internasional.

Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi penyebab kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Pertama, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kedua, dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural.

Kemiskinan absolut mencerminkan suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan absolut merujuk pada ketidakmampuan atau ketidakberdayaan seseorang untuk hidup secara layak. Kemiskinan absolut umumnya diukur dengan menggunakan

garis kemiskinan yang konstan sepanjang waktu dalam bentuk jumlah maupun nilai pendapatan (uang). Namun pengukurannya juga dapat mengacu pada jumlah konsumsi kalori. Kriteria pengukuran seperti ini dikenal sebagai pendekatan biologis dan pendekatan kebutuhan dasar (Harmadi, 2007).

Pada konsep kemiskinan relatif, perhitungan kemiskinan didasarkan pada proporsi distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat. Suatu kelompok masyarakat dianggap miskin relatif jika pendapatannya termasuk 30 persen terendah dari distribusi pendapatan. Dengan menggunakan kriteria ini, maka dapat dipastikan bahwa akan selalu ada penduduk miskin dalam suatu wilayah. Namun begitu dengan adanya asumsi pendapatan rata-rata masyarakat yang terus meningkat, maka garis kemiskinan juga terus meningkat. Di sini garis kemiskinan tidak menjadi fokus, karena lebih berorientasi pada upaya untuk memperkecil disparitas pendapatan antara mereka yang berada di bawah (miskin) dan mereka yang makmur (*better-off*). Meskipun demikian, sebenarnya ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan. Beberapa orang mengeluhkan bahwa mereka merasa terkucil dan rendah diri dalam pergaulan dengan orang yang "tidak miskin", meskipun secara absolut, sebenarnya orang tersebut tidak termasuk ke dalam kategori miskin.

Menurut pendekatan kemiskinan alamiah, timbulnya masalah kemiskinan lebih disebabkan karena keterbatasan individu maupun lingkungan. Dari sisi individu, kemiskinan dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya sifat malas, rendahnya keterampilan yang dimiliki, kurangnya kemampuan intelektual, keterbatasan fisik, dan rendahnya kemampuan untuk mengatasi masalah yang muncul di sekitarnya. Kemiskinan dari sisi individu secara sederhana dapat terjadi karena faktor-faktor biologis, psikologis dan kelemahan sosialisasi yang dimiliki oleh seorang individu miskin. Semua ketidakmampuan itu selanjutnya membuat seseorang akan sulit untuk melakukan usaha atau bekerja guna memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk perbaikan hidupnya.

Sementara itu, pendekatan kemiskinan alamiah yang melihat dari sisi lingkungan fisik beranggapan bahwa kemiskinan diakibatkan oleh lingkungan fisik (alam) yang tidak mendukung. Beberapa contoh dari kondisi itu diantaranya: tanah yang tidak subur serta topografi wilayah yang tidak menguntungkan, kepadatan penduduk yang melebihi daya dukung lingkungan alamnya, serta adanya kelangkaan sumberdaya.

Secara sederhana dapat dikatakan, kemiskinan alamiah lebih banyak disebabkan rendahnya kualitas SDM, sumberdaya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, bencana alam, dan lain-lain. Sementara itu, kemiskinan struktural yang biasa juga disebut dengan kemiskinan buatan. Baik langsung atau tidak, kemiskinan kategori ini umumnya disebabkan tatanan kelembagaan dan aturan main yang diterapkan. Lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin (Samosir, 2004). Sistem sosial ekonomi yang berlaku memungkinkan terkonsentrasinya kekuasaan dan sumberdaya pada pihak tertentu yang berakibat terhambatnya peluang pihak lain untuk ikut mengakses. Contoh kondisi ini misalnya terlihat dari adanya ketimpangan atau kesenjangan antara desa dan kota, antar lapisan masyarakat, antar jenis kelamin, dan lain sebagainya.

Terminologi lain yang melekat dengan istilah kemiskinan adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut dapat dikurangi, dan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya yang menghalangi seseorang dalam melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik (Hidayat, 2007).

Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dapat tercapai adalah adanya kejelasan mengenai "kriteria" tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang termasuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Sedangkan syarat penting selanjutnya ialah memahami secara tepat apa yang menjadi penyebab kemiskinan di suatu komunitas.

Karena itu, bagi siapa saja yang berminat memahami makna suatu angka statistik, diperlukan terlebih dahulu kejelasan yang cukup dengan landasan pijak, konsep, definisi, indikator, dan standar prosedur dari mekanisme bekerjanya suatu proses statistik. Dalam hal pengukuran angka kemiskinan misalnya, metodologi yang diaplikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini adalah dengan pendekatan konsumsi melalui pengeluaran rumah tangga.

Pilihan pada pendekatan rumah tangga untuk konsumsi didasari oleh kenyataan bahwa hampir mustahil di tengah kompleksitas jenis dan status pekerjaan sebagai sumber pendapatan, dan juga kejujuran semua pihak, untuk dapat menempuh pendekatan pendapatan secara langsung. Banyak studi di negara berkembang dan juga pengalaman empiris pengumpulan data

kemiskinan melalui pendekatan pendapatan rumah tangga, ternyata sangat riskan dan senantiasa berhadapan dengan kebohongan, inkonsistensi, dan insuffisiensi yang dalam bahasa statistik disebut tidak memiliki realibilitas yang cukup. Jalan satu-satunya saat ini, dan memang rasional, yaitu melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga yang merupakan proksi dari pendapatan.

Sumber data kemiskinan di Indonesia dapat di bedakan menjadi dua yaitu: 1) **Data Makro**, diperoleh dari pendataan secara sampel, yang selanjutnya dipakai sebagai angka perkiraan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dengan menggunakan penimbang. Sumber data makro adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Penggunaannya untuk target geografis dan indikator kinerja pemerintah. 2) **Data Mikro**, diperoleh dari hasil pendataan secara lengkap terhadap target sasaran rumah tangga miskin. Sumber data mikro ini ada tiga, yakni: i) Pendataan Sosial Ekonomi Nasional 2005, dengan target sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT), Oktober 2005 sampai dengan September 2006 sebagai respons seketika atas kenaikan BBM Oktober 2005, ii) Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007 (SPDKP07), dengan target sasaran **Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)** sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 2007-2008, iii) Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS11), dengan target Rumah Tangga Miskin/rumah tangga sasaran (RTS) yang digunakan sebagai database untuk semua program anti-kemiskinan. Meskipun penentuan miskin yang digunakan berbeda antara ketiga sumber data kemiskinan tersebut, seyogyanya ketiganya harus memiliki kekonsistenan antara satu dengan lainnya.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (Data Makro)

Sesuai dengan banyaknya dimensi dari kemiskinan, metodologi penghitungan penduduk miskin pun cukup banyak. Banyaknya penduduk miskin yang disajikan pada ulasan berikut adalah yang diperoleh dengan metode BPS. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan yang bersifat mendasar.

Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti: Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM) dari **penduduk referensi**, yaitu penduduk yang rentan untuk menjadi miskin. Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari (sesuai dengan rekomendasi hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978). Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.

Sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan makanan untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Sumber data utama yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Modul Konsumsi.

Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin pun berubah dari tahun ke tahun, sesuai dengan perkembangan harga. Pada tahun 2017 garis kemiskinan di Kabupaten Sikka sebesar 288,3 ribu rupiah. Dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 354,2 ribu rupiah.

Tabel 5.1 Perkembangan Penduduk Miskin Di Kabupaten Sikka, Tahun 2017-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp.000/kap/ bulan)	Jumlah penduduk Miskin (000)	Persentase *) penduduk miskin (%)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2017	288,3	45,0	14,20
2018	298,4	44,0	13,82
2019	302,0	43,3	13,53
2020	324,8	42,2	13,12
2021	354,2	43,1	13,29

Keterangan : *) Persentase terhadap total seluruh penduduk.

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Perkembangan angka-angka kemiskinan tersebut dapat dianggap sebagai gambaran keberhasilan berbagai program pengentasan kemiskinan yang banyak dilaksanakan pada periode tersebut. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena **penduduk miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Berdasarkan garis-garis kemiskinan tersebut di atas maka diperoleh jumlah penduduk miskin Kabupaten Sikka seperti yang disajikan pada Tabel 5.1. Dari tabel tersebut tampak bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka pada periode 2017-2020 cenderung menurun, yaitu dari 45,0 ribu penduduk atau sekitar 14,20 persen pada tahun 2017 menjadi 42,2 ribu penduduk atau sekitar 13,12 persen terhadap total penduduk di tahun 2020, namun mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 43,1 ribu penduduk atau sekitar 13,29 persen terhadap total penduduk di tahun 2021.

Berbagai program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan pemerintah, baik di masa Orde Baru maupun di era reformasi, seperti pengembangan desa tertinggal, Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), beras rakyat miskin (Raskin), bantuan operasional sekolah (BOS), Askeskin, pembangunan perumahan rakyat, bantuan kredit mikro, Bantuan Tunai Bersyarat (BTB/PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan sebagainya. Berbagai program tersebut, yang telah berjalan sejak tahun 1990-an, telah mampu menurunkan angka kemiskinan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tersebut di atas adalah program beras untuk rakyat miskin (Raskin). Program Raskin diluncurkan Oktober 2001. program ini merupakan pengganti program OPK yang diadakan untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi 1998, yang diluncurkan 1 Juli 1998. Program ini ditetapkan Pemerintah melalui kebijakan Perberasan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2002. Dalam butir kelima diamanatkan bahwa pemerintah memberikan jaminan persediaan dan pelaksanaan distribusi beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan (Cicik, 2004).

Pemerintah kemudian membuat program BPNT yang merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (*e-voucher*) dari Bank Penyalur. Besaran BPNT adalah 110.000 rupiah per KPM per bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan dalam bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. KPM

dapat menggunakan *e-voucher* tersebut untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan *e-warong*.

Pada tahun 2017, transformasi Program Rastra menjadi Program BPNT dilaksanakan di 44 kota terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih melaksanakan Program Bansos Rastra. Hingga saat ini penerapan BPNT semakin diperluas. Selain BPNT, program perlindungan sosial lainnya yang disediakan oleh pemerintah antara lain berupa Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pada Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Sikka pada tahun 2021, banyaknya rumah tangga yang menerima dan memanfaatkan BPNT/Program Sembako adalah sekitar 23,78 persen, Program Indonesia Pintar/PIP sekitar 18,85 persen, Kartu Keluarga Sejahtera/KKS sekitar 11,51 persen dan Program Keluarga Harapan/PKH sekitar 22,30 persen.

Tabel 5.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perlindungan Sosial Yang Diterima Selama Tahun 2021, Di Kabupaten Sikka

Sikka	2021
(1)	(2)
❑ Rumah Tangga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT (%)	23,78
❑ Rumah Tangga Penerima PIP (%)	18,85
❑ Rumah Tangga Penerima Kartu Keluarga Sejahtera/KKS (%)	11,51
❑ Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan/PKH (%)	22,30

Sumber : BPS, Susenas 2021

Pola Pengeluaran

Pengeluaran Rata-rata Per Kapita

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dengan jelas melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka pendekatan yang sering digunakan dalam setiap survei, termasuk Susenas, adalah melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga.

Oleh karena itu, data pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Data konsumsi/pengeluaran dibedakan atas kelompok makanan dan kelompok bukan makanan untuk dapat melihat tingkat kecukupan gizi khususnya kecukupan konsumsi kalori dan protein dan juga untuk melihat bagaimana penduduk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Menurut hukum Engle, jika pendapatan meningkat, maka proporsi pengeluaran terhadap bahan-bahan makanan akan semakin menurun. Dengan perkataan lain, semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan untuk makanan.

Tabel 5.3 Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Distribusi Pengeluaran Per Kapita Sebulan Dan Jenis Pengeluaran di Kabupaten Sikka, 2021

Distribusi Pengeluaran Perkapita Sebulan	Jenis Pengeluaran	
	Makanan	Bukan Makanan
(1)	(2)	(3)
40% Bawah	69,95	30,05
40% Tengah	55,14	44,86
20% Tinggi	42,92	57,08
Total	52,51	47,49

Sumber : Susenas 2021

Data persentase pengeluaran penduduk seperti disajikan pada Tabel 5.3 menunjukkan hukum Engle tersebut di atas. Pada penduduk yang berada di golongan distribusi pengeluaran perkapita sebulan "40% bawah-" persentase pengeluaran untuk bukan makan adalah sebesar 30,05 persen. Angka persentase tersebut terus meningkat, dan pada golongan distribusi pengeluaran perkapita sebulan "20% tinggi" persentase pengeluaran penduduk untuk bukan makanan mencapai 57,08 persen di Kabupaten Sikka. Secara keseluruhan di Kabupaten Sikka, persentase pengeluaran untuk barang bukan makanan adalah 47,49 persen.

Persentase pengeluaran makanan dari suatu rumah tangga terhadap pengeluaran total mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga. Semakin tinggi persentasenya maka semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin miskin rumah tangga tersebut. Data persentase penduduk dengan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan penduduk Kabupaten Sikka selama periode 2021 terlihat cenderung semakin menurun dari golongan distribusi pengeluaran perkapita sebulan "40% bawah" hingga "20% tinggi", yakni sebesar 69,95 persen penduduk pada

golongan distribusi pengeluaran perkapita sebulan ”40% bawah” dan 42,92 persen penduduk pada golongan distribusi pengeluaran perkapita sebulan ”20% tinggi”. Secara keseluruhan di Kabupaten Sikka, persentase pengeluaran untuk jenis pengeluaran berupa makanan adalah 52,51 persen

Tabel 5.4 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Sikka, 2021

Jenis Pengeluaran	2021
(1)	(2)
➤ Padi-padian	12,46
➤ Sayuran dan buah	6,24
➤ Ikan, daging, telur dan susu	9,62
➤ Makanan minuman jadi	12,99
➤ Makanan lainnya	11,20
➤ Perumahan	23,58
➤ Pakaian	1,77
➤ Non Makanan lainnya	22,14
J u m l a h	100,00

Sumber : Susenas, 2021

Pengeluaran Untuk Makanan

Besarnya pengeluaran untuk makanan relatif terhadap pengeluaran total mengindikasikan kemampuan ekonomi suatu rumah tangga. Tingginya persentase pengeluaran untuk makanan menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut dalam kondisi miskin. Artinya, sebagian besar pengeluarannya untuk makan. Padahal kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga tidak hanya makan, tetapi ada kebutuhan lain yaitu diantaranya adalah kebutuhan sandang, pendidikan, kesehatan, dan papan.

Pengeluaran untuk makanan bergizi ditentukan berdasarkan jumlah pengeluaran untuk ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta pengeluaran makanan lainnya. Tabel 5.4 menyajikan komposisi pengeluaran/konsumsi penduduk Kabupaten Sikka per kapita per bulan pada tahun 2021. Dari Tabel tersebut terlihat bahwa pada kelompok pengeluaran untuk makanan, mayoritas (di atas 12 persen) untuk membeli padi-padian. Sedangkan pengeluaran untuk membeli sayur-sayuran dan buah-buahan sebesar 6,24 persen pada tahun 2021. Lebih tinggi dari kelompok sayuran, pengeluaran untuk membeli ikan, daging, telur dan

susu, merupakan makanan berprotein tinggi yakni sebesar 9,62 persen dari total pengeluaran dan pengeluaran untuk makanan minuman jadi yakni sebesar 12,99 persen dari total pengeluaran.

Pengeluaran Untuk Bukan makanan

Pada Tabel 5.5 juga tampak bahwa pada kelompok pengeluaran untuk bukan makanan di Kabupaten Sikka, dimana mayoritas pengeluaran adalah untuk perumahan yakni sebesar 23,58 persen pada tahun 2021. Pengeluaran untuk membeli pakaian, biaya kesehatan, dan kelompok non makanan lainnya persentasenya masih di bawah 23 persen dari total pengeluaran.

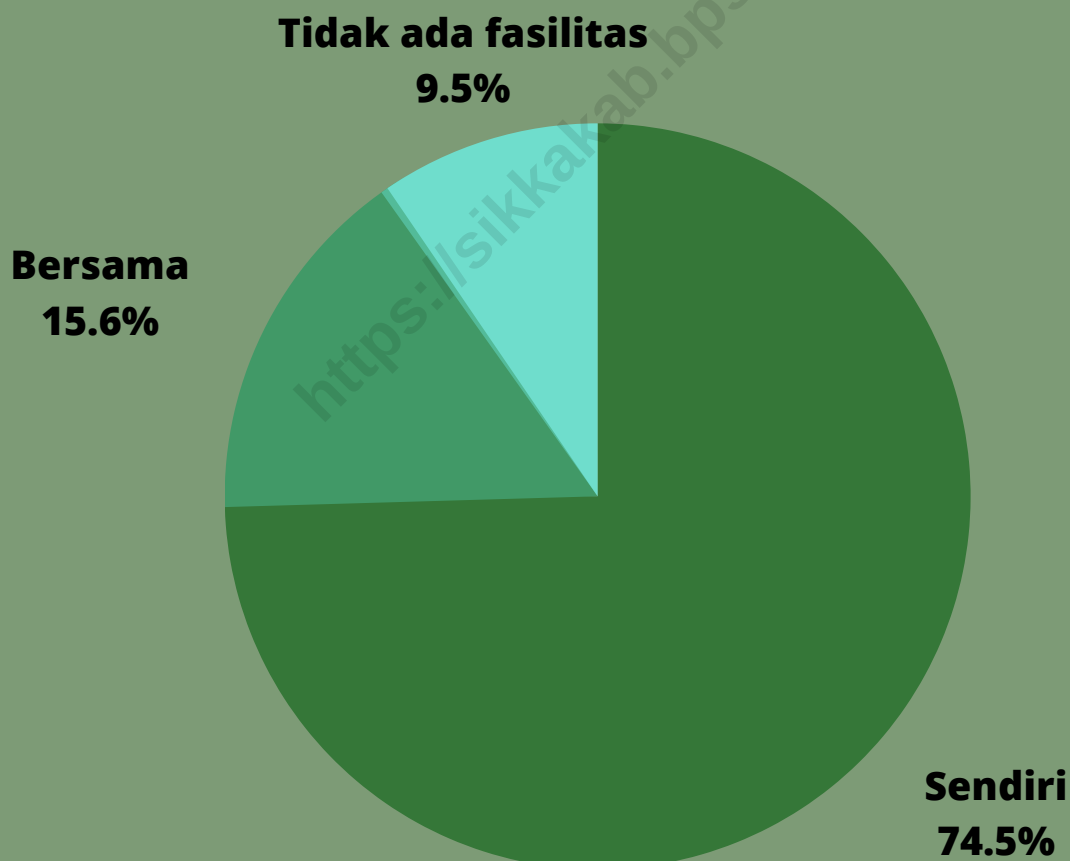
<https://sikkakab.bps.go.id>

Halaman Kosong

6

PERUMAHAN & LINGKUNGAN

Persentase Rumah Tangga menurut Sumber
Air Minum di Kabupaten Sikka, 2021



88,46%
rumah tangga menggunakan
telepon seluler

BAB VI

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah dikategorikan sebagai bagian dari kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia selain sandang dan papan. Fungsi rumah tidak hanya sebagai tempat untuk tidur tetapi juga merupakan tempat untuk berlindung dari panas, hujan, dan ancaman keamanan. Kebutuhan rumah semakin lama semakin meningkat, ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta semakin bertambahnya rumah tangga baru. Di lain pihak kemampuan daya beli setiap orang relatif kurang, walaupun untuk membeli rumah sederhana. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan perumahan yang difokuskan pada pembangunan perumahan yang sehat serta aman. Sehat dalam arti aman dari ancaman racun/polusi bahan bangunan yang digunakan. Aman mengandung pengertian fisik lingkungan sekeliling rumah, dalam arti tindak kejahatan serta akses ke fasilitas lainnya. Pelaksanaan pembangunannya kemudian dilakukan oleh pihak pengembang (Safiyati 2002).

Kebersihan dan lingkungan rumah tinggal secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan anggota rumah tangga atau keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Indikator yang digunakan untuk menentukan indeks potensi keluarga sehat adalah pertama, tersedianya sarana air bersih; kedua, tersedianya jamban keluarga; ketiga, lantai rumah bukan dari tanah; keempat, peserta KB (bagi keluarga dengan PUS); kelima, memantau tumbuh kembang anak (bagi yang punya balita); keenam, menjadi peserta Dana Sehat/JPKM/Askes. Tiga indikator pertama, yaitu tersedianya sarana air bersih, jamban keluarga dan lantai bukan dari tanah merupakan indikator lingkungan yang semuanya berada di sekitar tempat tinggal (Sutji 2000).

Kondisi Kualitas Rumah Tinggal

Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati menunjukkan semakin baik keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Secara umum kualitas rumah ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas rumah yang

baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan penghuninya.

Tabel 6.1 memperlihatkan persentase indikator kondisi rumah yang tidak sehat berdasarkan hasil Susenas, yang diperhatikan dari luas lantai rumah, lantai terluas dari tanah, atap rumah terluas dari dedaunan, dinding rumah terbuat dari bilik (bukan tembok) dan tidak menggunakan listrik. Salah satu kriteria rumah sehat dan nyaman adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai yang sesuai dengan jumlah penghuninya sehingga penghuninya tidak berdesakan. Keadaan rumah tidak padat penghuni, menghindarkan rumah dari sarang tikus dan jentik nyamuk. Bila dalam tahun 2018 tercatat sekitar 51,96 persen rumah tangga yang tinggal dalam rumah dengan rumah yang tersedia untuk setiap anggota rumah tangganya kurang dari 50 meter persegi. Pada tahun 2021 persentase ini menurun menjadi 40,31 persen.

Tabel 6.1. Indikator Kondisi Rumah di Kabupaten Sikka, 2018-2021

Indikator Kondisi Rumah	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
❖ Luas lantai kurang dari 50 m ²	51,96	37,71	39,45	40,31
❖ Lantai tanah	24,31	21,65	22,40	16,66
❖ Atap dedaunan	1,37	1,46	0,98	0,42
❖ Dinding bilik (bukan tembok)	66,56	69,18	61,29	57,99
❖ Penerangan bukan listrik	17,27	9,41	14,42	9,74

Sumber :BPS, Susenas, 2018-2021

Jika dilihat jenis lantai terluas yang ditempati, persentase penggunaan lantai tanah/bamboo/sejenisnya di Kabupaten Sikka keadaannya menurun dari 24,31 persen pada tahun 2018 menjadi 16,66 persen pada tahun 2021. Berdasarkan penggunaan jenis atap terluas, persentase rumah tangga yang menggunakan atap dedaunan menurun dari 1,37 persen pada tahun 2018 menjadi 0,42 persen di tahun 2021. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat menurut penggunaan jenis dinding. Rumah tangga di Kabupaten Sikka lebih banyak menggunakan dinding “bukan tembok”. Persentasenya pada tahun 2018 sebanyak 66,56 persen, dan pada tahun 2021 menjadi 57,99 persen.

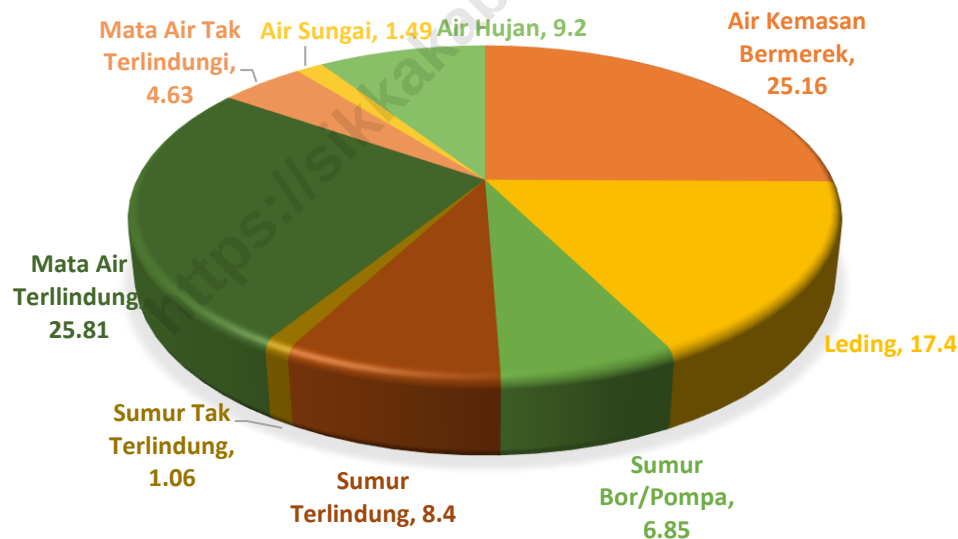
Listrik merupakan sumber penerangan yang mempunyai nilai paling tinggi dibandingkan dengan penerangan “bukan listrik” seperti petromak, pelita, dan sumber penerangan lainnya. Hal ini disebabkan karena listrik lebih praktis dan modern, serta tidak menimbulkan polusi. Rumah

tangga yang menggunakan listrik dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Penggunaan listrik pada periode 2018-2021 terlihat berfluktuasi namun cenderung menurun, hal ini dapat juga dilihat dari persentase rumah tangga yang tidak menggunakan listrik yang mengalami penurunan persentase dari 17,27 persen pada tahun 2018 menjadi 9,74 persen pada tahun 2021.

Sumber Air Minum

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk yang harus dipenuhi. Jika air tidak ditangani dengan baik, maka penduduk akan merugi karena dapat kekurangan air atau bahkan kelebihan air yang berupa bencana banjir. Oleh karena itu dalam upaya pemenuhan air penduduk berbagai aktivitas pembangunan harus selalu diselaraskan dengan penanganan lingkungan yang baik.

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Sikka, 2021



Sumber : BPS, Susenas 2021

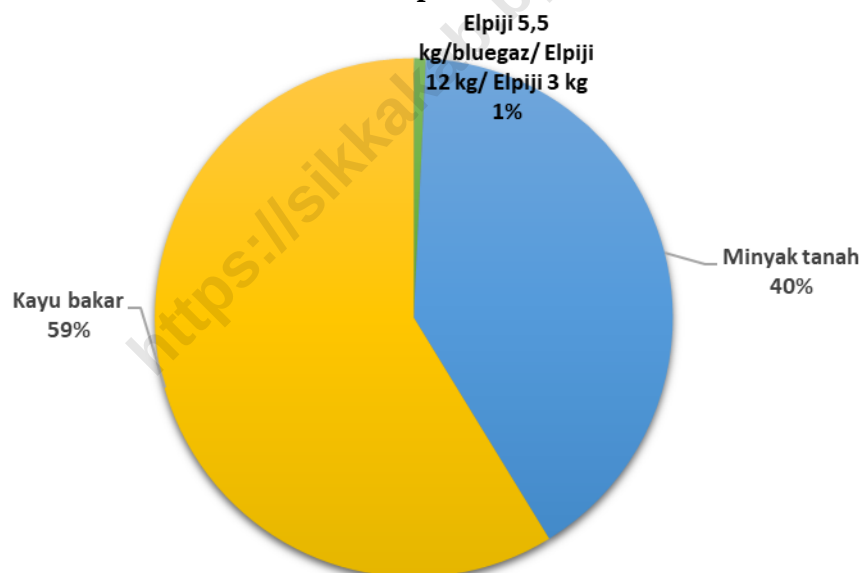
Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun merupakan suatu tantangan bagi pemerintah dalam hal penyediaan air bersih. Masalah yang sudah ada belum terselesaikan yaitu dalam hal pemenuhan kebutuhan air, ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah penduduk. Hal penting lainnya, penduduk perlu air tidak hanya cukup dalam jumlah tapi juga air tersebut secara kualitas harus memenuhi syarat kesehatan.

Air yang bersumber dari mata air relatif tidak menimbulkan masalah kesehatan. Namun, bila tidak diikuti perlindungan selama pengaliran air dari mata air ke rumah-rumah, ia bisa menjadi berbahaya. Perlindungan yang baik itulah yang perlu dilakukan oleh para penggunanya.

Di antara sekian banyak jenis sumber air minum yang digunakan, Mata air merupakan sumber air yang paling banyak digunakan sebagai sumber air minum oleh rumah tangga di Kabupaten Sikka. Pada tahun 2021, rumah tangga yang memenuhi keperluan air minumnya berasal dari sumber mata air sebanyak 30,44 persen, di ikuti air kemasan dan isi ulang sebesar 25,16 persen. Selain mata air dan air kemasan, leding juga banyak digunakan di Kabupaten Sikka sebanyak 17,40 persen, sumur 16,31 persen dan air sungai, hujan, dan lainnya sebesar 10,69 persen.

Kebersihan Udara

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Energi Yang Digunakan Untuk Memasak di Kabupaten Sikka, Tahun 2021



Sumber : BPS, Susenas 2021

Dalam masalah udara perlu diperhatikan dari bahan bakar energi yang digunakan untuk memasak,. Pada umumnya bahan bakar energi yang dianggap aman untuk memasak tidak berasal dari kayu bakar karena tidak menghasilkan asap yang dapat mencemari udara. Dari Gambar 6.2 terlihat bahwa pada tahun 2021 persentase rumah tangga di Kabupaten Sikka mayoritas masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar energi yang digunakan untuk memasak yaitu sebesar 59 persen. Sementara itu masih sekitar 1 persen rumah tangga yang menggunakan

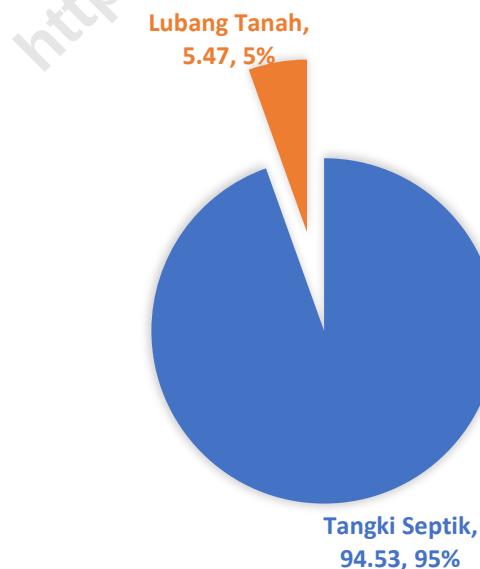
elpiji/bluegaz dan sisanya sebesar 40 persen menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar energi untuk memasak.

Kebersihan Lingkungan

Masalah lingkungan masih merupakan masalah yang cukup besar khususnya di Kabupaten Sikka dan pada umumnya di Indonesia, sehingga kesadaran mempunyai lingkungan yang baik belum memadai. Padahal kesadaran akan lingkungan yang sehat akan menjadi modal tersendiri di dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadikan ciri suatu penduduk yang beradab. Selama ini perbaikan lingkungan sering dilakukan karena anjuran pemerintah, yang berarti masyarakat belum sepenuhnya sadar bahwa perbaikan terhadap lingkungan itu merupakan suatu investasi menuju hidup yang lebih baik dan sehat di kemudian hari (Fadjri 2000).

Kesadaran akan lingkungan secara keseluruhan berawal dari kondisi lingkungan kecil yaitu kondisi lingkungan rumah tangga. Banyak hal yang mempengaruhi belum munculnya kesadaran tersebut di antaranya tingkat pendidikan, kesadaran kesehatan dan pendapatan masyarakat itu sendiri yang belum mendukung. Indikator yang secara langsung dapat memberikan gambaran tentang kebersihan lingkungan perumahan antara lain adalah tempat anggota rumah tangga buang air besar.

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Sikka, 2021



Sumber : BPS, Susenas 2021

Gambar 6.3 memperlihatkan tempat pembuangan akhir tinja oleh anggota rumah tangga yang akan menentukan ke mana perginya tinja tersebut. Apakah menyerap ke dalam tanah (misalnya lobang tanah) atau langsung disalurkan ke sungai atau pantai. Keduanya dapat menimbulkan pencemaran. Pencemaran ke dalam tanah, misalnya dapat mencemari sumber air tanah seperti sumur, mata air atau pompa jika jarak sumber air tanah ke penampungan air besar kurang dari 10 meter. Di lain pihak, pembuangan langsung ke saluran air atau sungai akan sangat mempercepat tercemarnya air sungai dan lingkungan. Seperti terlihat di Gambar 6.3, dalam tahun 2021 sebagian besar rumah tangga (94,53 persen) telah memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik.

Dari segi fasilitas tempat buang air besar, dalam tahun 2021 persentase rumah tangga yang mempunyai fasilitas jamban sendiri mempunyai angka terbesar yakni sekitar 74,54 persen. Arti penting keberadaan jamban sendiri ini tidak saja berkaitan dengan pentingnya kesehatan penduduk, namun juga bisa mencerminkan kesadaran akan kebersihan lingkungan. Kesadaran mempunyai lingkungan yang bersih, lebih jauh mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang berpendidikan dan bermoral baik. Sementara itu masih terdapat 9,53 persen rumah tangga yang tidak ada/tidak mempunyai fasilitas jamban. Sedangkan untuk rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air bersama adalah 15,62 persen dan 0,31 persen rumah tangga diantaranya menggunakan fasilitas umum, seperti terlihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Sikka, 2021

Fasilitas Buang Air Besar	2021
(1)	(2)
❖ Sendiri	74,54
❖ Bersama	15,62
❖ Umum	0,31
❖ Tidak ada fasilitas	9,53
Jumlah	100,00

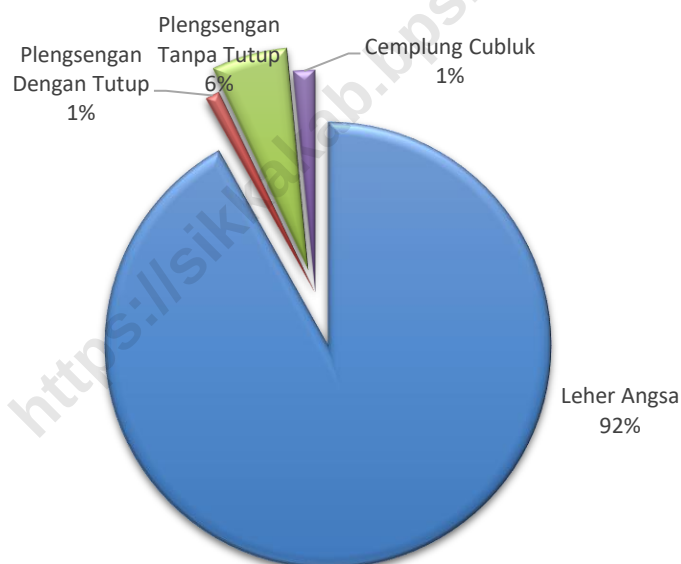
Sumber : BPS, Susenas 2021

Tempat buang air besar suatu rumah tangga mempunyai hubungan (korelasi) dengan keadaan kesehatan anggota rumah tangganya dan masyarakat sekitarnya. Jamban/kakus leher angsa adalah tempat buang air besar yang baik ditinjau dari segi kesehatan lingkungan, karena

saluran yang berbentuk “U” tersebut dimaksudkan untuk menampung air sehingga bau tinja tidak keluar. Jamban ‘plengsengan’ adalah jamban yang dibawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke tempat pembuangan kotoran. Jamban seperti ini masih kurang baik karena tidak bisa menahan bau. Jamban cemplung dan tidak pakai (tempat buang air besar di sungai atau kolam) adalah beberapa contoh yang “kurang sehat” (kurang baik).

Gambar 6.4 memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan jamban leher angsa adalah yang terbesar bagi masyarakat di Kabupaten Sikka yaitu sebesar 92 persen pada tahun 2021. Sebaliknya, rumah tangga yang menggunakan jamban plengsengan, persentasenya meningkat dari 5 persen di tahun 2020 menjadi 7 persen di tahun 2021. Sementara untuk jenis kloset cemplung cubluk hanya digunakan oleh sekitar 1 persen rumah tangga di Kabupaten Sikka.

Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Menurut Jenis Kloset di Kabupaten Sikka, Tahun 2021



Sumber : BPS, Susenas 2021

Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi

Sesuai dengan perkembangan teknologi, alat komunikasi seperti telepon, telepon selular (*handphone/HP*), dan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Tabel 6.3 menyajikan banyaknya rumah tangga di Kabupaten Sikka menurut kepemilikan sarana komunikasi, hasil Susenas 2021. Dari Tabel 6.3 terlihat bahwa hingga tahun 2021, persentase total rumah tangga di Kabupaten Sikka yang memiliki telepon seluler/komputer

semakin banyak dimana sekitar 88,46 persen. Sedangkan persentase rumah tangga yang tidak memiliki telepon seluler/komputer adalah sebesar 11,54 persen.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Sikka menurut Kepemilikan Telepon Seluler/Komputer, 2021

		Apakah menggunakan telepon seluler/komputer?	
		Ya	Tidak
(1)		(2)	(3)
Jenis kelamin KRT	KRT Laki-laki	89,31	10,69
	KRT Perempuan	83,13	16,87
Distribusi pengeluaran per kapita sebulan	40% bawah	80,30	19,70
	40% menengah	92,39	7,61
	20% atas	96,17	3,83
Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT	KRT tamat SD ke bawah	84,79	15,21
	KRT tamat SMP ke atas	95,62	4,38
Total		88,46	11,54

Sumber : BPS, Susenas 2021

Halaman Kosong

<https://sikkakab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

<https://sikkakab.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moh. Arsjad dan Udi Hade Pungut.** 1992. “ Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Struktur Tenaga Kerja Antar Wilayah di Indonesia, 1971 - 1990 “. Dalam Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Asamanedi, Drs.**1999.”Persepsi Remaja Mengenai Perkawinan Menuju Reproduksi Sehat”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-29, No.4,1999. Jakarta: Lembaga Demografi FE-UI.
- Bagian Analisis dan Pengembangan Statistik Kependudukan.** 2000. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 1999*. Jakarta : BPS.
- Bagian Analisis Statistik Sosial.**1993. *Analisis Perkembangan Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia 1983-1991*. Jakarta : BPS.
- BPS, BAPPENAS dan UNDP.** 2001. *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001*. Jakarta: BPS, BAPPENAS dan UNDP.
- Brodjonegoro, Bambang P.S, Dr.** 2000. “ Pemulihan Ekonomi, Otonomi Daerah Dan Kesempatan Kerja Di Indonesia “. Dalam Warta Demografi Tahun ke-30, No.3, 2000. Jakarta : Lembaga Demografi FE - UI.
- Chotib.** 2007. “ Menyiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas Menyambut ”Jendela Kesempatan”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-37, No.1, 2007. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Cicih, Lilis Heri Mis, Ir., Msi.** 2001. “ Menghindari Lost Generation Melalui Perbaikan Gizi Anak Balita”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-31, No.4, 2001. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- , 2005. “ Karakteristik Penduduk Lanjut Usia Indonesia Masa Kini”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-35, No.3, 2005. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Fadjri, Panpan Achmad, Ir.**2000. “ Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Menurut Kota Di Indonesia. Berdasarkan Data Susenas 1998”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-30, No.3, 2000. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Fadjri, Panpan Achmad.** 2006. “ Peran Penting Proyeksi Penduduk untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Tingkat Kabupaten”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-36, No.4, 2006. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.

- Harmadi, Sonny Harry B., Nuruly, Shaqita.** 2006. “ Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Kesejahteraan Manusia dan Kaitannya dengan PDRB pada 26 Propinsi di Indonesia”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-36, No. 4, 2006. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Harmadi, Sonny Harry B.** 2007. “ Pengangguran, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-37, No. 3, 2007. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Hasbullah, Jousairi.** 2007. ” Perspektif Data Kemiskinan BPS ”. Dalam Media Indonesia, 9-Juli-2007
- Lesmana, Teddy.** 2007. ”Aset dan Kemiskinan”. Dalam Republika, 9-Juli-2007.
- Manning, Chris.**1992. *Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja Di Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Muliakusuma, Sutarsih.** 2000. “ Perkawinan Dan Perceraian Dalam Kaitannya Dengan Perbedaan Umur Suami Istri ”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-30, No.2, 2000. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Murni, Sylviana.** 2002. “ Kebijakan Kependudukan Pada Era Otonomi Daerah Di Provinsi DKI Jakarta “. Dalam Warta Demografi Tahun ke-32, No.4,2002. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Nasution, Ahmad Riswan.** 2007. ” Statistik Kemiskinan, BPS, dan Otonomi Daerah ”. Dalam Media Indonesia, 11-Juli-2007.
- Nazara, Suahasil.** 2007. “ Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CCT*) bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan.” Dalam Warta Demografi Tahun ke-37, No.3, 2007. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Nurdin, Harto.** 2000. “ Mobilitas Penduduk Menjadi Trend Masalah Kependudukan Di Masa Depan.” Dalam Warta Demografi Tahun ke-29, No.1, 2000. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Prihastuti, Dewi, SE., Msi.** 2001. “ Sebaran Penduduk Lansia Di Indonesia/ Saat ini dan Masa Depan Kajian Perspektif Demografi Multiregional “. Dalam warta Demografi Tahun ke-31, No.4, 2001. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Prihastuti, Dewi.** 2007. “ Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan untuk Menyongsong Bonus Demografi “. Dalam Warta Demografi Tahun ke- 37, No.1, 2007. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.

- Priyono, Edi.** 1999. “ Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Dimensi Makro Dan Mikro”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-29, No.3, 2000. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- R.Siregar, Sutji.** 1999. “ Implikasi Dinamika Penduduk Indonesia Sekarang Dan Yang Akan Datang Dalam Bidang Kesehatan”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-29, No.4, 2000. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Ritonga, Razali.** 2006. ”Indeks Pembangunan Manusia”. Dalam Kompas, 20-Desember-2006.
- Safiyati.** 2002. “ Parameter Perumahan”. Dalam Varia Statistik No.5 Tahun XX April-Oktober 2002. Jakarta : Humas BPS.
- Salahudin, Andi.** 2007. ”Mengampanyekan Pengentasan Kemiskinan”. Dalam Republika, 11-Juli- 2007.
- Salim, Emil.** 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.
- Saputro, Edy Purwo.** 2007. ”Pendataan dan Komitmen Pembangunan”. Dalam Republika, 7-Juli- 2007.
- Simanjuntak, Payaman J.** 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia/ Edisi 2001*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Soeprobo, Tara B., Tata Tachman.** 2002. “ Jaminan Kebutuhan Dasar Penduduk Indonesia”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-32, No. 2 & 3, 2002. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Sumarjatiarjoso.** 2005. “ Sumbangan Program Keluarga Berencana dalam Mencapai Sasaran MDGs “. Dalam Warta Demografi Tahun ke-32, No.4, 2002. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Surapaty, Surya Chandra, MPH, PHD, Prof., dr., dkk.** 2002. “ Upaya Pengendalian Kualitas Penduduk Di Era Otonomi Daerah “. Dalam Warta Demografi Tahun ke-35, No.2, 2005. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Susanti, Hera, Moh. Ikhsan dan Widyanti.** 2000. *Indikator - Indikator Makroekonomi/Edisi kedua*. Jakarta : Lembaga Penerbit FE-UI.
- Tjiptoherijanto, Priyono.** 1999. “ Urbanisasi Dan Pengembangan Kota Di Indonesia”. Dalam *Populasi Volume 11*, No.1, 2000. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM.

Wasisto, Broto. 2003. “ Sumber Daya Manusia dan Kondisi Kesehatan Penduduk Masa Depan di Indonesia “. Dalam Warta Demografi Tahun 33, No.1, 2003. Jakarta : Lembaga Demografi FE- UI.

Widaningrum, Ambar. 2003. “ Utilisasi Pelayanan Kesehatan : Problem Antara Pemerataaan dan Efisiensi (Studi di Wilayah Pedesaan Kabupaten Purworejo) “. Dalam Populasi Volume 14 Nomor 1 Tahun 2003. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

<https://sikkakab.bps.go.id>

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIKKA**

Jl. Wairklau No. 29 Maumere 86112 Nusa Tenggara Timur,
Telp: (0382) 21371
Homepage: www.sikkakab.bps.go.id
Email: bps5310@bps.go.id